

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia

1. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bagian dari Hizbut Tahrir (HT) yang berada di Palestina. Hizbut Tahrir (HT) berawal dari sebuah gerakan atau kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ulama yang dipimpin oleh Syekh Taqiyuddin al-Nabhani. Kelompok tersebut didirikan pada tahun 1953 Masehi atau 1372 Hijriyah di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina.¹

Pemikiran Islam merupakan pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir. Pemikiran tersebut meliputi akidah Islam, pemikiran yang dibangun di atasnya, dan hukum-hukum yang terpancar darinya. Hizbut Tahrir hanya menjalankan pemikiran Islam yang bersifat umum (global), mereka juga mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukan dalam aktivitas *isti'naf al-hayah al-Islamiyah* (mengembalikan kehidupan yang islami), serta mengemban dakwah Islam dengan mendirikan negara khilafah. Hizbut Tahrir menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsinya dalam berbagai buku dan pamflet yang dikeluarkannya,

¹ Kurnia Indasah, “*Konsep Gender dalam Media Islam Online*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 43

dan menjelaskan dalil secara detil dari setiap hukum, pendapat, pemikiran, dan konsep.²

Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan kaum muslim ke dalam kehidupan Islam di dalam Dar al-Islam dan masyarakat Islam, yang berarti seluruh urusan kehidupan di dalamnya dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syara' dan pandangan hidup yang berlaku adalah halal haram. Negara khilafah merupakan negara yang terdapat kaum muslim mengangkat seorang khalifah, yang dibai'at untuk mengimplementasikan hukum berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan untuk mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dengan jihad.³

Hizbut Tahrir juga menginginkan membangkitkan kaum muslim dengan kebangkitan yang benar dengan pemikiran yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha mengembalikan umat Islam pada kemuliaan dan keagungan yang pernah dimiliki sebelumnya dengan cara merebut kembali kendali kepemimpinan dunia, umat, dan bangsa. Jadi negara umat Islam kembali menjadi negara nomor satu di dunia seperti yang pernah dicapai sebelumnya, yang akan mengurusinya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Tak hanya itu, kelompok ini juga bertujuan membimbing dan memimpin umat manusia melakukan pergolakan (perang) terhadap

² Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), hal 32-33

³ Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), hal 33

kekufuran, sistem dan pemikiran kufur, sampai Islam tersebar secara menyeluruh di seluruh dunia.⁴

Kelompok awal HT melakukan berbagai studi, penelitian, maupun kegiatan tentang kehidupan umat Islam pada masa lampau dan masa kini. Mereka berusaha mencari tahu kehidupan umat Islam sebenarnya yang berada di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, terutama dititikberatkan pada interaksi antara rakyat dengan pemerintah, termasuk undang-undang dan peraturan apa yang berlaku. Lalu, semua permasalahan tersebut digantungkan pada hukum syara'. Inti dari gerakan HT adalah menerapkan dan menegakkan syari'at Islam dengan mengembalikan bentuk pemerintahan *Khilafah Islamiyyah*.⁵

2. Visi dan Misi

Visi kelompok HTI adalah melanjutkan kehidupan Islam melalui penegakan Khilafah. Sedangkan misi kelompok tersebut ialah membina umat dengan pemikiran-pemikiran Islam serta membongkar orang-orang kafir.⁶

3. Struktur Organisasi

Dalam hal ini, peneliti sulit memperoleh data terkait struktur organisasi kelompok HTI. Saat *website* HTI masih dapat diakses oleh pembaca, redaksional HTI tidak mengunggah struktur kelompoknya.

⁴ *Ibid.*, hal 33-34

⁵ Kurnia Indasah, "*Konsep Gender dalam Media Islam Online*", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 44

⁶ *Ibid.*, hal 47

Bahkan dalam sumber lain pun seperti buku, peneliti sulit memperoleh data tersebut.

4. Media Online HTI

Webiste HTI dibuat pada tanggal 12 Februari 2014. Merujuk pada data *real time* dari pelacak statistik *website*, ShatShow, *website* HTI terdeteksi memperoleh visitor sejumlah 163.920 per bulan dengan *page view* 360.630 atau sekitar 5450 pengunjung per hari.⁷

Konten dari *website* HTI di antaranya, *Kantor Jubir*, *Berita*, *Media*, *Muslimah*, *Seputar Syariah*, *Seputar Khilafah*, *Tentang Hizbut Tahrir*, dan *Pustaka Digital*. Kolom *Kantor Jubir* terbagi atas *Press Release* dan *Nasyrah*. Sedangkan, kolom *Berita* terbagi dari *Dalam Negeri*, *Luar Negeri*, dan *Dinamika Dakwah*. Dan kolom *Media* menyajikan *Al-Islam*, *Al-Wa'ie*, dan *HTI Channel*.

Keunggulan dari *website* HTI adalah tersedianya link download PDF untuk setiap artikel yang *diposting*, sehingga pembaca yang ingin menyimpan tulisan tersebut dapat langsung mengklik tombol tanpa harus *copy paste* ke *word*. Kekurangannya ialah kurang sensitif terhadap *keyword* (kata kunci) yang dimasukkan ke kotak pencarian. Dengan demikian, terkadang satu kata kunci kadang menampilkan puluhan artikel yang sebagian besar tidak ada hubungannya sama sekali.⁸

⁷ *Ibid.*,

⁸Kurnia Indasah, “*Konsep Gender dalam Media Islam Online*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 48

B. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama

1. Sejarah

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926 oleh sejumlah tokoh tradisional dan usahawan Jawa Timur. Pembentukan NU seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensive terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Sarekat Islam (SI).⁹

Rapat di rumah Kiai Wahab yang dianggap sebagai pembentukan NU, dipimpin oleh Kiai Hasjim sendiri. Kebanyakan mereka sendiri hadir dalam rapat tersebut (termasuk Kiai Wahab) menganggap diri mereka murid Kiai Hasjim, dikarenakan pernah belajar di Tebuireng. Kebanyakan mereka juga adalah kawan-kawan Kiai Wahab dan terlibat bersama Tashwirul Afkar (KH Ahmad Daclan), Nahdlatul Wathan (mas Abdul Azis, pengganti mas Manshoer), atau Nahdlatul Tujjar. Nama Nahdlatul Ulama menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi-organisasi yang lebih awal ini.¹⁰

Kepengurusan kelompok NU terdiri dari unsur ulama dan bukan ulama, tetapi unsur ulamanya lebih dominan. Kebanyakan ulama

⁹ Martin Van Bruinessen, *NU-Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta-Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994), hal 17

¹⁰ Martin Van Bruinessen, *NU-Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta-Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994), hal 37

tersebut bukanlah kiai, yang memimpin pesantren. Mereka yang tidak termasuk ulama diberi posisi di badan eksekutif (*Tanfidziyah*), sementara para ulama menjadi bahan legislatif (*Syuriyah*). Kiai Hasjim Asj'ari menjabat sampai akhir hayatnya sebagai Ketua (Rois) *Syuriyah*. Pada mulanya Kiai Wahab menjabat sebagai Sekretaris *Syuriyah*, akan tetapi mundur sedikit menjadi penasehat (*mustasyar*). Namun dalam prakteknya tetap menjadi kekuasaan penggerak organisasi ini.¹¹

2. Visi dan Misi

Visi dari kelompok NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menurut salah satu dari madzhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.¹²

Sedangkan misi dari NU di antaranya, melaksanakan Dakwah Islamiyah *Ahlussunnah wal Jamaah* dalam membimbing umat menuju masyarakat muatamaddin, memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak. Selain itu, NU juga memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan

¹¹ *Ibid.*, hal 38-39

¹² Kurnia Indasah, "*Konsep Gender dalam Media Online Islam*", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 57

kesejahteraan ekonomi umat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan, menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil, serta juga mendorong kemadirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³

3. Struktur Organisasi

- a. Pengurus Besar (tingkat Pusat)
- b. Pengurus Wilayah (tingkat Provinsi)
- c. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota)
- d. Majelis Wakil Cabang (tingkat Kecamatan)
- e. Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)

Untuk tingkat pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

- a. Mustasyar (Penasehat)
- b. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
- c. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk tingkat ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

- a. Syuriaah (Pimpinan Tertinggi)
- b. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

4. Media Online NU

¹³ *Ibid.*, hal 58

Situs <http://www.nu.or.id> didirikan pada tanggal 19 Maret 1999. Merujuk pada data *real time* dari pelacak statistik *website*, ShatShow, *website* milik NU mendapat 91.560 kunjungan serta 210.480 tampilan halaman per bulan, atau sekitar 3.050 pengunjung per hari.¹⁴

Terdapat 18 menu atau kategori pada *website* NU, yaitu: (1) Warta, (2) Keislaman, (3) Khutbah, (4) Wawancara, (5) Hikmah, (6) Taushiyah, (7) Doa, (8) Tokoh, (9) Fragmen, (10) Pesantren, (11) Opini, (12) Seni Budaya, (13) Pustaka, (14) Humor, (15) Pendidikan Islam, (16) Quote Islami, (17) Kajian Keagamaan, dan (18) Anti Hoax. Menu Warta dibagikan menjadi empat bagian, di antaranya Nasional, Daerah, Internasional, dan Risalah Redaksi. Sedangkan, menu Keislaman dibagi menjadi tiga bagian, yakni Ubudiyah, Syari'ah, dan Bahtsul Masail.

Website NU sudah cukup layak sebagai *media online* resmi sebuah organisasi besar. Sangat disayangkan, pengaturan alamat URL masih diatur *default* sehingga pengunjung akan kesulitan untuk menghafalkan lokasi sebuah artikel. Contohnya, URL untuk kategori Kolom adalah <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-lang,id-ids,4-t,kolom-phpx>, bukan dengan URL yang mudah diingat seperti <http://www.nu.or.id/kolom>.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hal 58

¹⁵ *Ibid.*, hal 60

C. Wacana Pluralisme Agama dalam Pemberitaan *Media Online* HTI dan NU

Berita ialah salah satu wacana yang menarik untuk dikaji, melihatnya tidak hanya dari aspek kebahasaan saja, tetapi juga praktik kewacanaan yang erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan di balik media tersebut. Khususnya dalam penelitian ini, membahas terkait pemberitaan pluralisme agama yang terdapat dalam dua *media online* yang diproduksi oleh kelompok Islam mapan dan sempalan, sehingga dapat dibandingkan wacana pemberitaan keduanya. Dasar pembeda dalam tulisan-tulisan yang diambil oleh peneliti pada dua kelompok media tersebut dilihat dari masing-masing judul yang bersikap berlawanan dan diambil secara acak tanpa melihat kesamaan waktu dalam kolom kata kunci (*keyword*) “pluralisme agama”. Selain itu, peneliti membagi tulisan tersebut secara seimbang ditinjau dari jenis tulisannya. Masing-masing kelompok memiliki jenis tulisan *straight news*, *feature news*, dan opini. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Wacana Pluralisme Agama dalam Pemberitaan *Media Online* Kelompok Sempalan dan Mapan (Studi Perbandingan pada *Media Online* Hizbut Tahrir Indonesia dan Nahdlatul Ulama)”. Adapun judul tulisan yang dianalisis sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Judul Tulisan yang Dianalisis

No	Website	Judul	Bulan	Tahun
----	---------	-------	-------	-------

1.	HTI	M. Ismail Yusanto: Isu Kebhinekaan untuk Memojokkan Umat Islam	Desember	2016
2.		Peringatan Penting Panglima TNI, Proxy War!	Maret	2016
3.		KH Kholil Muhammad: Semoga Tak Ada Kiai Nyeleneh Lagi Setelah Gus Dur	Januari	2010
4.	NU	Di Haul, KH Muadz Thohir Ceritakan Keistimewaan Gus Dur	Januari	2016
5.		Memahami Isi dan Kemasan, Bagaimana Kita Harus Bersikap?	Februari	2016
6.		Tiga Perguruan Tinggi AS Belajar Pluralisme ke PBNU	Juni	2014

1. *Media Online* HTI

a. Analisis Teks

1) “M. Ismail Yusanto: Isu Kebhinekaan untuk Memojokkan Umat Islam”

Dalam tulisan yang *diposting* pada bulan Desember tahun 2016, tema atau topik yang digambarkan ialah bagaimana memosisikan isu kebhinekaan. Topik dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan, sehingga semua tulisan baik itu berita atau artikel opini mengacu dan mendukung topik berita. Penulis memaknai isu kebhinekaan sering dikaitkan oleh kelompok sekuler dan liberal untuk memojokkan umat Islam dan umatnya, sekaligus memuluskan agenda liberalisasi dan sekularisasi seperti yang terpapar dalam kalimat pengantar yang ditulis oleh redaksi. Kata ‘memojokkan’ yang terdapat dalam judul telah menjustifikasi terlebih dahulu terhadap isu kebhinekaan dan bersifat provokatif. Skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik

tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Tulisan ini berbentuk artikel dialog wawancara bersama narasumber yang mengawali skema kalimat pengantar sebagai prolog untuk memunculkan alur dan gagasan tulisan. Lalu, redaksi HTI menanyakan pertanyaan kepada narasumber seperti yang terlihat pada laman tulisan, mengenai kasus-kasus pembelaan terhadap Islam, seperti membela Al-Qur'an, protes pembangunan gereja illegal, tuntutan penerapan syariah Islam, dan berjilbab di daerah minoritas. Pada tengah-tengah dialog wawancara, redaksi secara bertahap menanyakan kepada narasumber yang bernama M. Ismail Yusanto (Jubir HTI) mengenai isu kebhinekaan yang dianggap menyimpang, seperti kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), pornoaksi, pornografi, serta hal negatif lainnya seperti inkonsistensi isu kebhinekaan. Pada bagian akhir, redaksi mencoba menguraikan pertanyaan mengenai pandangan Islam dalam menghadapi isu kebhinekaan. Ini adalah upaya HTI untuk menonjolkan sikap agama Islam yang menurut penuturan narasumber, menerima keberagaman sesuai syariahnya.

Latar peristiwa digunakan untuk menyediakan dasar hendak ke mana makna teks dibawa. Hal ini juga merupakan cerminan ideologis, di mana seorang jurnalis mampu menyajikan latar belakang dapat juga tidak, tergantung pada kepentingan mereka. Teks tersebut berbentuk dialog wawancara di mana narasumber ialah bagian penting dari organisasi massa HTI. Dalam teks tersebut, narasumber beberapa kali memunculkan kasus-

kasus pro kontra dalam mempersoalkan isu kebhinekaan, salah satunya kasus Ahok. Ini merupakan salah satu penggalan kalimat narasumber menanggapi isu kebhinekaan:

”Salah satu poin utama kampanye pendukung Ahok juga mengangkat isu kebhinekaan. Maksudnya, kesediaan kita untuk menerima Ahok sebagai gubernur DKI adalah bagian dari penerimaan terhadap kebhinekaan itu. Bahkan dikatakan oleh mereka, Ahok adalah simbol kebhinekaan. Menolak Ahok berarti menolak kebhinekaan. Hebat, kan? Malah sekarang ada yang berani mengatakan, kebhinekaan kita belum sempurna bila non-Muslim belum menjadi presiden Indonesia”.¹⁶

Dalam teks ini, narasumber cukup detil menjawab pertanyaan dari redaksi, sehingga redaksi pun hanya menggali seputar jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Ini merupakan salah satu jawaban dari narasumber yang detil untuk menciptakan tertentu kepada khalayak.

“Buktinya, setelah ditentang sekian lama, LGBT dan pernikahan sejenis akhirnya sekarang dilegalkan. Bila penyimpangan-penyimpangan itu terus berlanjut, ternyata juga akan berdampak pada kondisi demografi. Angka pertumbuhan penduduk akan terus menurun. Bahkan di beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Italia, pertumbuhan penduduk mendekati angka nol. Artinya, jumlah orang yang meninggal sama dengan yang lahir. Soal tingkat kelahiran bayi memang menjadi problem di sana, karena bagaimana akan lahir generasi baru bila orang mau kawin tetapi tidak mau menikah. Kalaupun menikah, tidak mau punya anak. Kalau punya anak, paling satu atau dua. Apalagi bila kawin dengan sesama jenis, dari mana akan lahir anak? Situasi seperti ini sangat mencemaskan para pemimpin negara-negara itu. Penduduk yang ada tentu makin lama makin tua. Lantas siapa yang bakal menggantikan mereka? Siapa yang akan menjadi tentara, pegawai negeri dan sebagainya?”

Hampir seluruh informasi yang disajikan oleh komunikator tampak secara eksplisit dan jelas. Kemudian, penggunaan kata “tetapi” pada

kalimat *“isu kebhinekaan bukan hanya untuk memojokkan umat Islam, tetapi juga dipakai untuk usaha melegalkan hal yang sangat mungkar seperti LGBT, bahkan juga pernikahan sejenis (same-sex marriage)”* memiliki elemen wacana koherensi. Di sini ada dua kalimat, yaitu *“isu kebhinekaan tidak hanya untuk memojokkan umat Islam”* dan *“isu kebhinekaan dipakai untuk usaha melegalkan LGBT, juga pernikahan sesama jenis”*. Kedua kalimat tersebut dihubungkan sebagai hubungan keadaan. Tak hanya itu, elemen wacana koherensi juga dapat ditemukan dalam kalimat *“Keadaan yang penuh pertentangan akibat pelegalan terhadap sejumlah perilaku menyimpang semacam itu dengan alasan kebhinekaan tentu akan membuat masyarakat tidak nyaman”*. Kedua kalimat tersebut dihubungkan sebagai sebab akibat. Kalimat di atas akan memiliki makna lain ketika dihubungkan dengan anak kalimat lain seperti, *“Keadaan yang penuh pertentangan dan pelegalan terhadap sejumlah perilaku menyimpang seperti itu dengan alasan kebhinekaan tentu akan membuat masyarakat tidak nyaman”* mengesankan bahwa sejumlah perilaku yang menurut mereka menyimpang, bukan semata-mata dikaitkan dengan pelegalan.

Kita juga dapat menemukan elemen wacana koherensi kondisional dalam kalimat *“Semua pandangan itu bersumber dari Zat Yang Mahatahu, yang menciptakan manusia itu sendiri. Dialah Allah SWT”*. Di sini ada dua kalimat, di mana kalimat kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama yang dihubungkan dengan kata hubung *“yang”*. Arti

kalimat di atas tidak berubah apabila anak kalimat dihilangkan menjadi “*Semua pandangan itu bersumber dari Zat Yang Mahatahu. Dialah Allah SWT*”. Anak kalimat “*yang menciptakan manusia itu sendiri*” berfungsi sebagai penjelas saja dan pembaca juga sudah mengerti bahwa Allah SWT yang menciptakan manusia. Koherensi kondisional tersebut termasuk penjelas positif.

“*Saat ini isu kebhinekaan sering diangkat oleh kelompok sekular-liberal untuk memojokkan Islam dan umatnya*” ialah salah satu kalimat pasif yang ditemukan dalam teks artikel opini tersebut. Dalam kalimat pasif, seseorang atau kelompok menjadi objek pernyataannya. Kalimat “*Kelompok sekular-liberal sering mengangkat isu kebhinekaan untuk memojokkan Islam dan umatnya saat ini*” menempatkan kelompok sekular-liberal sebagai subjek. Pokok yang dipandang penting ditempatkan di awal kalimat yaitu isu kebhinekaan. Kalimat aktif memiliki kesan yang berbeda, media HTI memfokuskan pada tingkatan isu kebhinekaan sebagai subjek.

Pada artikel yang berjudul “M. Ismail Yusanto: Isu Kebhinekaan untuk Memojokkan Umat Islam”, peneliti melihat kata ganti jamak seperti “kita” ditunjukkan untuk HTI yang diharapkan dapat menciptakan kesamaan sikap kepada khalayak pembaca. Hal ini bermaksud untuk merangkul dukungan dan menghilangkan oposisi yang ada. Sedangkan, kata ganti “mereka” ditunjukkan bagi orang-orang yang menerima kebhinekaan. Kata ganti “kita” digunakan untuk menunjukkan tidak ada

batas wartawan dengan khalayak, dan kata ganti “mereka” digunakan untuk pihak yang tidak sependapat. Peneliti telah mencuplik satu penggalan kalimat, yaitu:

“O, iya. Jelas sekali ada. Bila mereka konsisten, mestinya mereka juga akan berteriak soal kebhinekaan di manapun dan kapanpun. Faktanya, itu hanya mereka lakukan ketika umat Islam bergerak dan berjuang membela kepentingan umat serta menolak kezaliman non-Muslim, seperti yang sedang hangat terjadi di Jakarta terkait Ahok. Buru-buru mereka bicara kebhinekaan dan persatuan di mana-mana, termasuk bikin acara yang terkait kebhinekaan, seperti Parade Kebhinekaan atau Parade Kita Indonesia. Padahal yang dituntut oleh kita kan keadilan, yakni hukuman setimpal kepada penista al-Quran. Tuntutan itu tak ada kaitannya dengan kebhinekaan. Justru kebhinekaan dan persatuan akan terganggu jikalau penista al-Quran dibiarkan; keadilan tidak ditegakkan.”

Teks berita umumnya mengandung banyak sekali praanggapan, ditambah lagi teks yang diteliti oleh peneliti merupakan artikel opini. Praanggapan merupakan fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu. Dalam kalimat *“Isu kebhinekaan amat sering dijadikan sekadar alat politik ampuh untuk meredam aspirasi umat, juga memojokkan umat”*. Apakah isu kebhinekaan yang sering dijadikan alat politik, juga turut menyudutkan umat? Apakah semua manusia merasa tersudut dengan adanya kebhinekaan? Umumnya praanggapan didasarkan pada ide *common sense*, pernyataannya dapat dipercaya meskipun itu belum tentu juga terjadi.

Selanjutnya dalam wacana tulisan tersebut, pemakaian huruf tebal digunakan pada kata pengantar ketika redaksi menyebutkan “siapa” narasumber. Hal ini bertujuan untuk memperjelas siapa yang hendak

diwawancarai oleh redaksi dalam topik ini. Sebelumnya, kata “redaksi” juga bercetak miring. Dan kata “Pengantar” dicetak tebal. Bagian-bagian tersebut ditonjolkan untuk menekankan kepada khalayak untuk tidak lupa memerhatikan tulisan tersebut. Selain itu, dalam penggalan kalimat “Padahal yang dituntut oleh kita *kan* keadilan, yakni hukuman setimpal kepada penista al-Quran” terdapat imbuhan “kan” yang bercetak miring. Kata tersebut dianggap penting oleh komunikator, redaksi HTI mempersuasi kepada pembaca untuk “kita menuntut keadilan”. Peneliti juga menemukan elemen wacana grafik pada kalimat “Bila hal ini dibiarkan, tentu akan sangat berbahaya karena akan terjadi *lumrahisasi* LGBT, pornografi, pornoaksi, dan pernikahan sejenis”. Kata “lumrahisasi” ditampilkan dengan huruf yang berbeda jika dibandingkan dengan kata lainnya. Dalam KBBI, kata “lumrahisasi” memang tidak ditemukan, akan tetapi “lumrah” dan “kelumrahan” dapat ditemukan. Kata “lumrahisasi” mengandung dua persepsi, yakni kata tersebut secara wajar dicetak miring karena menjadi istilah asing bagi pembaca. Di sisi lain kata “lumrahisasi” menjadi bagian penting yang ditonjolkan oleh pihak media mengingat redaksi *mentranskrip* wawancara narasumber dengan penjelasan isu-isu yang dianggap menyimpang seperti, LGBT, pornografi, pornoaksi, dan pernikahan sejenis. Selebihnya, redaksi menggunakan tulisan bercetak miring pada pertanyaan dan kata-kata serapan bahasa asing.

Peneliti juga menemukan elemen wacana metafora. Dalam kalimat yang bertuliskan “*Karena itu fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan*

pluralisme agama sudah sangat tepat dan bila ada upaya yang ingin menghapus fatwa itu harus tegas ditolak” digunakan sebagai landasan berpikir dan alasan pembenar atas gagasan tertentu kepada publik. Pemakaian tersebut bermaksud untuk memperkuat pesan utama dalam teks yang diproduksi oleh *media online* HTI.

2) “Peringatan Panglima TNI, Proxy War!”

Tema umum pada teks media yang dianalisis oleh peneliti mengenai ancaman perang proksi atau disebut dengan proxy war. Apabila kita menggunakan analisis Van Dijk, dalam teks akan didukung oleh subtopik, misalnya kapitalisme dengan pemikiran-pemikiran pokoknya antara lain sekularisme, demokrasi, liberalisme, Hak Asasi Manusia (HAM), pluralisme yang telah menghancurkan Indonesia. Subtopik tersebut membentuk topik utama, yakni ancaman proxy war. Gagasan yang diusung oleh Van Dijk seperti ini membantu peneliti untuk mengamati dan memusatkan perhatian pada bagaimana teks dibentuk oleh wartawan. Tulisan yang berjudul “Peringatan panglima TNI, Proxy War” mengawali tulisan oleh pernyataan Jenderal Gatot Nurmayanto, seorang Panglima TNI yang mengingatkan tentang proxy War sebagai ancaman nyata bagi Indonesia. Penulis yang bernama Farid Wadжди memilih menuliskan pernyataan tersebut pada bagian awal teks karena dianggap penting, terlebih lagi kutipan tulisan tersebut diungkapkan orang yang dianggap berpengaruh di Indonesia, Panglima TNI. Setelah itu, tulisan disusul dengan menjabarkan mengenai pemikiran-pemikiran yang dapat

menghancurkan Indonesia. Skema tulisan tersebut diakhiri dengan upaya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang pernah mengingatkan bahkan berkampanye secara massif bahwasannya pemikiran-pemikiran yang dianggap dapat merusak Indonesia merupakan musuh nyata bagi Indonesia. Proses penyusunan tulisan yang diposting pada Maret 2016 lalu, tidak semata melibatkan unsur teknik jurnalistik, tetapi juga dapat menimbulkan efek tertentu.

Dalam struktur berita tentang ancaman proxy war, penulis menampilkan latar dengan menguraikan HAM sebagai pemecah belah Indonesia, demokrasi menjadi pintu masuknya pemimpin yang pro imperialis, dan fenomena kemunculan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Elemen wacana detil dapat ditemukan pada kalimat “Lucunya, pelaku dan pendukung HAM ini memosisikan sebagai pihak yang dizolimi, ditindas, didiskriminasi. Padahal mereka didukung oleh perusahaan-perusahaan kapitalis besar dunia seperti Appel, Starbucks, Google, Facebook, eBay, Nike.inc, Gap, Microsoft, Instagram, dan Mastercard, yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Obama pun secara terbuka mendukung LGBT dan menekan pihak manapun yang anti LGBT. PBB menggelontorkan dana yang besar bagi kampanye LGBT. Facebook tidak ketinggalan, menjadi dictator media yng baru dengan menghapus akun-akun anti LGBT”. Penulis menampilkan informasi dengan detil mengenai perusahaan-perusahaan yang dianggap kapitalis sebagai pendukung HAM. Dari detil yang dikembangkan, akan

mendeskripsikan posisi penulis yang tidak simpati dengan perusahaan-perusahaan tersebut karena telah mendukung HAM yang memposisikan sebagai pihak yang termarjinal.

Menurut peneliti, elemen wacana maksud akan lebih baik dan mudah diamati apabila tulisan yang disajikan memiliki topik yang sama. Peneliti dapat membandingkan antara media A dan media B. Elemen maksud memiliki dua bagian di antaranya, implisit dan eksplisit. Informasi yang menguntungkan jurnalis dapat dilihat secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang tidak menguntungkan akan disembunyikan, disamar, dan implisit. Tanpa memiliki perbandingan dengan tulisan yang diproduksi dengan media lain, peneliti melihat teks tulisan yang menyinggung isu HAM diuraikan secara eksplisit.

Elemen wacana koherensi dapat dilihat dari kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan fakta. Misalnya, pernyataan “Hizbut Tahrir juga mengingatkan agar menghentikan segala bentuk kerjasama dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Karena merekalah pendukung kapitalisme dan gembong kejahatan di dunia Islam termasuk Indonesia”. Ada dua kalimat, yaitu “Hizbut Tahrir mengingatkan agar menghentikan segala bentuk kerjasama dengan negara-negara imperialis” dan “negara-negara imperialis sebagai pendukung kapitalisme dan gembong kejahatan di dunia Islam termasuk Indonesia”. Kalimat tersebut ditandai dengan kata hubung “karena” sebagai hubungan kausal. Pemakaian konjungsi “karena” dapat memberi kesan bahwa

negara-negara imperialis, seperti Amerika yang menyebabkan gembong kejahatan di dunia Islam termasuk Indonesia dan pendukung kapitalisme. Padahal belum tentu semua orang memiliki pandangan sama dengan media tersebut bahwa penyebab gembong kejahatan ialah Amerika dan sekutunya. Faktanya juga, salah satu perusahaan kapitalis yang menghasilkan microsoft word juga memberikan keuntungan pada dunia Islam. Kita dapat berdakwah melalui tulisan juga berkat mereka.

Peneliti tidak menemukan koherensi kondisional dan koherensi pembeda dalam kalimat-kalimat yang telah dibentuk menjadi feature news tersebut. Penulis juga menuliskan teks secara eksplisit tanpa menunjukkan elemen wacana pengingkaran. Pengingkaran menggambarkan seorang wartawan tidak secara tegas menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada pembaca. Teks media yang diteliti oleh peneliti memakai bentuk kalimat deduktif. Inti kalimat (umum) mengenai ancaman proxy war ditempatkan bagian awal untuk memperlihatkan pokok tulisan yang ingin disampaikan kepada khalayak.

Kata ganti “kita” pada teks tersebut ditunjukkan kepada pemilik media tersebut yang diharapkan memiliki kesamaan rasa terhadap pembaca. Misalnya, pada kalimat “kita sangat setuju dengan peringatan Panglima TNI ini. Tentu bukan tanpa alasan dan bukti, seorang panglima TNI menyampaikan hal ini. Namun penting untuk disampaikan kepada masyarakat, ideologi apa yang sesungguhnya telah memporakporandakan Indonesia. Tidak lain, kapitalisme dengan pemikiran-pemikiran pokoknya

antara lain sekulerisme, demokrasi, liberalisme, HAM, pluralisme. Inilah yang telah menghancurkan Indonesia. Perlu ditegaskan pula, negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, dan sekutunya adalah pelaku langsung imperialisme yang mengusung ideologi kapitalisme ini”.

Sedangkan, kata ganti “mereka” ditunjukkan kepada orang yang berlawanan dari apa yang dipikirkan oleh kelompok HTI. “Mereka” dapat diperuntukkan kepada orang yang setuju terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap penulis dapat menghancurkan Indonesia. Contohnya, pada kalimat “Hizbut Tahrir juga mengingatkan agar menghentikan segala bentuk kerjasama dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Karena merekalah pendukung kapitalisme dan gembong kejahatan di dunia Islam termasuk Indonesia”.

Dalam wacana mikro, elemen leksikon ialah elemen yang dapat menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atass berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Kata “memporakporandakan” pada kalimat “namun penting untuk disampaikan kepada masyarakat, ideologi apa yang sesungguhnya telah memporakporandakan Indonesia”, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “cerai berai”, “tidak karuan”, “berserakan”, “kacau balau”, “kucar-kacir”, “morat-marit”. Jika dikaitkan dengan kalimat tersebut, kata “memporakporandakan” mengesankan suatu ideologi yang telah membuat kacau balau Indonesia. Sebenarnya kata “memporakporandakan” dapat diganti dengan menggunakan kata “memberantakkan”. Namun, penggunaan kata

“memporakporandakan” lebih membangun wacana media HTI dan memberikan kesan tersendiri ketika khalayak membaca kalimat tersebut. Tak hanya itu, peneliti juga menemukan kata “pemimpin boneka” yang memiliki makna tersendiri saat dibaca. Misalnya pada penggalan kalimat yang tertulis seperti ini, “lewat pencitraan yang dibangun oleh media-media liberal, pemimpin boneka ini muncul sebagai pemenang dalam pemilu”. Kata “pemimpin boneka” ditunjukkan kepada Jokowi yang menjabat sebagai Presiden RI pada periode sekarang. Sebutan tersebut dikenal sejak ia memenangkan pemilu pemilihan Presiden lalu. Jokowi dikatakan sebagai bonekanya Megawati Soekarno Putri yang merupakan mantan Presiden RI sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di mana Jokowi bernaung. Pada awal kepemimpinannya, Megawati sering terlihat mengikuti kemana Jokowi pergi. Peneliti mengetahui julukan tersebut dari siaran media yang sedang gencar-gencarnya memberitakan pemilu pada saat itu. Pilihan kata-kata yang digunakan dapat menunjukkan sikap dan ideologi di balik media itu. Dapat dikatakan bahwa kelompok HTI tidak menyukai kepemimpinan era Jokowi, dan ini didukung dengan kalimat yang bertuliskan “pemimpin boneka ini mengabdikan 100% bagi kepentingan tuan Kapitalis yang telah mengangkatnya, bukan kepada rakyat”.

Pada akhir teks, penulis menemukan ungkapan “Allahu Akbar” yang memiliki arti Allah Maha Besar. “Allahu Akbar” biasanya digunakan sebagai pembakar semangat. Akan tetapi, ungkapan tersebut juga sering

diteriakkan bersamaan dengan unjuk rasa yang mendemonstrasikan kebencian terhadap kelompok lain.

3) “KH Kholil Muhammad: Semoga Tak Ada Kiai Nyeleneh Lagi Setelah Gus Dur”

Ketika teks berita yang berjudul “KH Kholil Muhammad: Semoga Tak Ada Kiai Nyeleneh Lagi Setelah Gus Dur” dibaca, peneliti menyimpulkan bahwa berita tersebut menggambarkan seorang Gus Dur yang memiliki pemikiran atau pandangan berbeda dengan kiai lainnya. Teks ini didukung oleh beberapa subtopik, di antaranya Gus Dur merupakan guru yang sulit dicari tandingannya dan pluralisme agama yang diusung Gus Dur membahayakan umat Islam. Berita yang berbentuk *feature* ini sebenarnya direpost ulang oleh *media online* HTI pada tanggal 04 Januari 2010 dari *website* tempointeraktif.com pada tanggal 30 Desember 2009 lalu. Tulisan *feature* tidak kaku, lebih mudah dipahami, dan tidak terikat dengan waktu. Seperti yang diketahui, kelompok HTI menolak keras keberadaan pemahaman pluralisme agama, tak khayal berita yang bersumber dari *website* tempointeraktif.com ditampilkan ulang dalam laman website <https://htichannel.hizbut-tahrir.or.id>.

Teks atau wacana umumnya memiliki skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Skema tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Berita ini diawali dengan judul “KH Kholil Muhammad: Semoga Tak Ada Kiai Nyeleneh Lagi Setelah Gus Dur”. Judul yang

dipilih oleh penulis mengandung *eye catching* tersendiri karena mengambil kata “nyeleneh”. Hal ini membuat pembaca penasaran dan tertarik dengan isi berita yang disampaikan. Dilanjutkan dengan *lead* yang tertulis dalam kalimat “sejumlah kiai dan ulama di Madura yang dikenal berlawanan pandangan politik dan agama dengan almarhum Gus Dur mengungkapkan turut berduka cita atas wafatnya mantan presiden RI keempat tersebut”. Lead sebagai pengantar ringkasan sebelum masuk ke dalam isi berita. Setelah itu, ada isi berita secara keseluruhan mengenai pandangan KH Kholil Muhammad mengenai eksistensi Gus Dur semasa hidupnya. Isi berita ini disampaikan secara ringkas dan terbilang pendek. Penyajian berita ini berstruktur kronologis, tidak berdasarkan hal penting atau tidak penting. Setiap uraian kalimat satu dengan lainnya memiliki bobot yang sama.

Wartawan yang menulis berita ini tidak menyajikan latar belakang bagaimana kepemimpinan Gus Dur saat ia menjabat sebagai presiden RI, contoh sikap nyeleneh Gus Dur, atau pemikiran pluralisme agama yang dianggap cukup kontroversi itu. Mengingat penulis merupakan bagian dari redaksi tempo, peneliti melihat penulis tidak menimbulkan bangunan teks yang menonjol dengan maksud tertentu. Hanya saja inti dari isi berita tersebut yang menyampaikan bahwa Gus Dur nyeleneh, maka HTI menampilkan ulang tulisan tersebut sesuai ideologinya yang menolak pluralisme agama termasuk Gus Dur sekalipun. Ini dapat dibuktikan pada kutipan wawancara bersama Ismail Yusanto, Jubir HTI dalam tulisan yang

berjudul “Jubir HTI: Pluralisme Bertentangan dengan Prinsip Aqidah Islam”. Ia mengatakan “menanggapi pemikiran dan kebijakan Gus Dur, semua harus dikembalikan kepada ketentuan Islam. Apa saja pemikiran dan kebijakan Gus Dur yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, misalnya tentang pluralisme agama, tentang upaya untuk mencabut larangan PKI atau sikap dia yang membela Ahmadiyah dan lainnya, semua itu harus ditolak. Sementara apa saja pemikiran dan kebijakan dia yang baik, yang sesuai dengan aqidah dan syariah, boleh kita dukung. Nah, kini beliau sudah meninggal, kita berharap semoga semua kesalahannya diampuni dan amal baiknya diterima Allah SWT. Amin”.

Wartawan akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Elemen wacana detil tidak digunakan oleh penulis berita tersebut. Tidak seperti tulisan yang diproduksi langsung oleh redaksi HTI yang menggunakan detil yang lengkap dan panjang lebar untuk menciptakan citra tertentu kepada pembaca. Salah satu kalimat tanpa wacana detil yaitu “ia mengaku secara politik dan pemikiran keagamaan bersebrangan dengan Gus Dur. Ia menilai pluralisme agama yang diusung Gus Dur sangat berbahaya bagi umat islam. “Semoga tidak ada lagi kiai nyeleneh secara pemikiran setelah Gus Dur,” ujarnya”. Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas, sebaliknya informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Peneliti mengamati bahwa bahasa berita

tersebut disampaikan dengan sederhana dan menghindarkan kata mubazir. Dikarenakan bobot kalimat satu dan lainnya sama, jadi tidak dapat digolongkan kalimat tersebut disampaikan secara implisit atau eksplisit.

Menurut definisinya, koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks. Akan tetapi, elemen wacana koherensi tidak ditemukan dalam keseluruhan teks berita dari awal sampai akhir. Elemen wacana koherensi kondisional dapat ditemukan dalam lead berita ini. “Sejumlah kiai dan ulama di Madura yang dikenal berlawanan pandangan politik dan agama dengan almarhum Gus Dur mengungkapkan turut berduka cita atas wafatnya mantan presiden RI ke empat tersebut”. Kata hubung “yang” adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama yang tertulis “sejumlah kiai dan ulama di Madura”. Jika diamati, penjelas tersebut tidak memberikan efek kepada khalayak. Di sini penulis hanya ingin menyampaikan bahwa sejumlah kiai dan ulama di Madura yang dikenal berlawanan pandangan dengan almarhum Gus Dur mengungkapkan bela sungkawa. Apabila kata hubung “yang” dihilangkan, maka pembaca memahami bahwa sejumlah kiai dan ulama di Madura mengungkapkan bela sungkawa kepada almarhum Gus Dur tanpa ada kalimat yang berlawanan pandangan dengan almarhum Gus Dur. Dari gagasan inti beritanya saja sudah terlihat apabila penulis ingin memfokuskan *angle* tulisannya, yakni Gus Dur yang nyeleneh.

Selain itu, peneliti juga tidak menemukan koherensi pembeda dalam teks *feature* tersebut. Penulis tidak pernah sekalipun

membandingkan satu fakta dengan realitas lain yang memunculkan efek yang berbeda-beda pula. Hal yang tersembunyi yang dilakukan oleh wartawan seolah ia menyetujui suatu pendapat, padahal yang dia inginkan adalah sebaliknya disebut sebagai pengingkaran.

Kalimat pengingkaran dapat dilihat dalam komentar narasumber, KH Kholil Muhammad. “ia mengaku secara politik dan pemikiran keagamaan bersebrangan dengan Gus Dur. Ia menilai pluralisme agama yang diusung Gus Dur sangat berbahaya bagi umat islam. “Semoga tidak ada lagi kiai nyeleneh secara pemikiran setelah Gus Dur,” ujarnya. Meski begitu, Kholil Muhammad mencatat berbagai jasa Gus Dur. Salah satunya, ia berhasil mengubah kultus ketokohan orang Jawa terhadap raja-raja kepada para ulama dan kiai. Seperti munculnya kiai langitan yang berpengaruh di pulau Jawa”. Rangkaian kalimat di atas berupa dua paragraf yang peneliti coba satukan. Tampak terlihat apabila Kholil berharap tidak ada lagi kiai nyeleneh secara pemikiran setelah Gus Dur. Setelah itu, Kholil membenarkan bahwa Gus Dur berhasil mengubah kultus ketokohan orang Jawa terhadap raja-raja kepada para ulama dan kiai. Di sini, peneliti sulit menyimpulkan apakah pemakaian kata “meski begitu” merupakan inisiatif wartawan atau wartawan hanya menuangkan sesuai apa yang disampaikan oleh narasumber. Seperti yang diketahui bahwa tulisan tersebut bukan disusun oleh redaktur media HTI, tetapi bersumber dari wartawan Tempo.

Kalimat dalam berita itu menggunakan bentuk deduktif di mana inti kalimat ditempatkan di bagian muka, kemudian keterangan tambahan diletakkan setelahnya. Pada tulisan ini, penulis tidak menggunakan kata ganti untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. Selain itu, elemen wacana praanggapan juga tidak dipakai oleh penulis. Begitu juga dengan elemen wacana metafora. Menurut peneliti, pemilihan kata “nyeleneh” yang digunakan oleh penulis Tempo, menjadi salah satu faktor pendorong *media online* HTI *repost* berita tersebut. Kedua, pernyataan KH Kholil Muhammad yang notabene orang NU menilai bahwa pluralisme agama yang diusung Gus Dur sangat berbahaya bagi umat Islam.

b. Analisis Kognisi Sosial

Van Dijk berpendapat bahwa titik kunci dalam memahami proses produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya teks. Proses terbentuknya teks tidak hanya dilakukan melalui metode wawancara saja, proses ini juga memasukkan informasi yang digunakan untuk menulis dari suatu bentuk wacana tertentu seperti laporan, konferensi pers, atau debat parlemen. Proses itu juga memasukkan di dalamnya bagaimana peristiwa ditafsirkan, disimpulkan, dan dimaknai oleh penulis yang akan ditulis dalam sebuah berita.

Ketika menganalisis elemen kognisi sosial pada *media online* HTI, peneliti melihat cara pandang kelompok HTI dari media massa lain khususnya Republika. Hal ini dikarenakan peneliti tidak bisa menemukan salah satu di antara mereka untuk melakukan wawancara pribadi.

Republika menjadi pilihan peneliti, karena Republika merupakan salah satu media massa yang berbasis Islam tanpa menunjukkan sikap. Peneliti masih melihat independensi pada media tersebut sehingga peneliti dapat memposisikan dirinya sebagai wartawan Republika.

Peneliti mencoba menelusuri pendapat Ismail Yusanto sebagai Juru Bicara (Jubir) HTI mengenai keberadaan kelompoknya pada berita-berita yang terpublikasi pada Republika *Online* (ROL). Posisi Ismail Yusanto sebagai Jubir HTI, tentunya hal ini berpengaruh besar terhadap nilai dan ideologi kelompok HTI sebagai pemilik *media online* HTI.

Dalam berita Republika yang berjudul “HTI Tolak Tudingan”, Ismail Yusanto mengaku menyesal dengan keputusan pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kita menyesalkan keputusan itu, ini kan organisasi dakwah dengan menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat untuk kebaikan,”

17

“Kalau bicara dengan substansi, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah yang juga berseberangan dengan nilai Pancasila, seperti

¹⁷ Yasin Habibi dan Dea Alvi Soraya, “HTI Tolak Tudingan Pemerintah”, Republika *Online*, <http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/17/05/08/opmykn314-hti-tolak-tudingan-pemerintah>, 08 Mei 2017

melindungi penista agama, hukum yang tidak adil, dan korupsi. Apakah itu sesuai dengan Pancasila?”¹⁸

Kutipan wawancara di atas mengacu pada skema diri (self schemas) yang berhubungan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang. Ismail Yusanto yang merupakan bagian dari kelompok HTI memandang bahwa ideologi yang dianut oleh kelompok HTI adalah benar. Seperti ulasan halaman sebelumnya mengenai gambaran umum HTI, sistem kekhilafahan menolak pembaharuan Islam dan paham-paham yang menyimpang menurutnya, termasuk pluralisme. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa tulisan-tulisan yang terdapat dalam *media online* HTI tidak sensitif keberagaman, karena pemikiran dan penafsiran penulis banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai atau kepercayaan yang diterimanya sebagai bagian dari anggota kelompok HTI.

Selanjutnya, pada teks berita Republika yang berjudul “HTI Anggap Tuduhan Pemerintah Tak Berdasar”, Ismail Yusanto juga mengungkapkan bahwa tuduhan anti Pancasila yang diarahkan pemerintah menurutnya adalah tuduhan politik yang tidak memiliki dasar. Menurutnya, kebijakan pembubaran ini patut diwaspadai menjadi bibit tumbuhnya anti rezim Islam. Mengingat sebelumnya kasus yang terkait dengan pelecehan Islam dan pembatasan dakwah Islam merebak.

¹⁸ Yasin Habibi dan Dea Alvi Soraya, “HTI Tolak Tuduhan Pemerintah”, Republika Online, <http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/17/05/08/opmykn314-hti-tolak-tuduhan-pemerintah>, 08 Mei 2017

c. Analisis Konteks Sosial

1) “M. Ismail Yusanto: Isu Kebhinekaan untuk Memojokkan Umat Islam”

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. Dalam tulisan yang dikemas dalam wawancara tokoh, redaksi mewawancarai seorang narasumber yang bernama M. Ismail Yusanto, yang tak lain merupakan Juru Bicara (Jubir) kelompok HTI. Percakapan antara redaksi HTI dan seorang Jubir yang juga bagian dari kelompok tersebut, menjadikan tulisan tersebut memiliki tujuan yang sama antara penanya dan penjawab. Apa yang diinginkan oleh redaksi HTI, juga merupakan keinginan Jubir HTI. Sebaliknya, apa yang ingin ditunjukkan oleh Jubir HTI, juga ingin ditunjukkan oleh redaksi HTI. Apabila narasumber mengungkapkan kalimat yang jujur atau tidak jujur, penulis hanya dapat mengikuti alur jawabannya saja. Narasumber yang tak lain merupakan Jubir HTI, mampu mengendalikan anggotanya karena ia lebih memiliki kekuasaan yang besar. Dari kata pengantar yang ditulis oleh redaksi, terlihat jelas apabila kelompok HTI menolak adanya pemahaman sekularisasi, liberalisasi, dan pluralisme agama. Teks yang menuangkan percakapan tersebut merupakan praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Dalam skripsi Kurnia Indasah yang berjudul Konsep Gender dalam Media Online Islam, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa semua ideologi selain Islam seperti

kapitalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, patriotism, sekterianisme, dan sejenisnya, tidak lain merupakan ideologi yang rusak dan bertentangan dengan fitrah manusia. Termasuk demokrasi yang dianggap sebagai buah kapitalisme, yang haram diikuti oleh umat Islam karena mengajak kepada kekufuran. Di sini, peneliti telah menemukan ideologi HTI bahwasannya mereka menolak pemahaman pluralisme agama, sebab dinilai ideologi yang rusak dan bertentangan dengan fitrah manusia.

Tulisan yang *diposting* pada Desember 2016, sangat sering menunjukkan kebenciannya terhadap Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ahok merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang terkena kasus penistaan agama karena telah menghina QS. Al-Maidah, saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Kasus tersebut mulai sering dibicarakan pada berbagai media massa, tidak jauh dari kejadian tersebut pada bulan September 2016. Isu yang masih terbilang hangat pada waktu itu, menjadikan *media online* HTI sering *update* melalui teks tulisan. Ketika peneliti mencoba mengetik *keyword* Ahok pada kolom ‘cari’, situs <https://htichannel.hizbut-tahrir.or.id> telah memproduksi banyak kasus Ahok. Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014 sampai dengan 9 Mei 2017. Ia memiliki keyakinan Kristen Protestan. Kelompok HTI menolak keberadaan Ahok kerana dua hal, ia memeluk keyakinan Kristen Protestan dan Ahok telah menista Al-Qur’an yang merupakan ajaran agama Islam. Kelompok tersebut menolak pemimpin

negara jatuh di tangan non muslim, karena mereka menganggap seharusnya sistem kekhilafahan yang harus ditegakkan untuk melanjutkan kehidupan Islam. Ditambah lagi, kasus penistaan terhadap Al-Qur'an oleh Ahok terus ditentang oleh massa yang kontra terhadap dirinya.

Redaksi mengangkat isu kebhinekaan kepada khalayak mengenai bagaimana memosisikan isu kebhinekaan. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis menjadi serupa karena narasumber tidak bertolak belakang atau memiliki kesamaan tujuan. Narasumber dalam teks tersebut tidak dirahaskan identitasnya. Kekuasaan kelompok HTI dalam wacana pluralisme agama bertujuan untuk mempengaruhi objek yang dikuasai, yaitu isu kebhinekaan. Teks tersebut telah memarjinalkan kelompok-kelompok yang pro terhadap Ahok, orang yang memiliki orientasi seksual sesama jenis, identitas gender, dan sejenisnya.

Narasumber menyebutkan pembakaran masjid di Tolikara, Papua sebagai bentuk inkonsistensi dalam menyerukan isu kebhinekaan. Berita pembakaran masjid di Tolikara, Papua yang dilansir oleh Republika Online, Natalius Pigai, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat bahwa kasus pembakaran rumah ibadah tersebut buntut reaksi masyarakat mayoritas atas kegagalan kepolisian dan pemerintah setempat soal aktivitas keagamaan lokal. Peneliti mencuplik beberapa kalimat yang mengacu pada persoalan yang disebut oleh narasumber dalam *media online* HTI:

<p>Natalius mengaku sudah meminta penjelasan dari warga sekitar untuk mengetahui duduk perkara. Dikatakan olehnya, peristiwa pembakaran masjid tersebut jauh dari konflik keagamaan. Apalagi kebencian terhadap Islam.</p>
<p>Natalius menerangkan, pembakaran masjid berawal dari peristiwa sepekan lalu. Kata dia, sejumlah jemaat Gereja Gidi melayangkan surat himbauan, isinya berupa pemberitahuan, bahwa pada 13 sampai 17 Juli akan dilaksanakan suatu gelaran keagamaan para jemaat di wilayah tersebut. Kegiatan jemaat itu mengingatkan larangan agar seluruh kegiatan keagamaan lain, yaitu Islam dan juga Kristen tak membuat kebisingan dan mengusik ketentraman. Jemaat meminta agar gereja dan masjid tak menggunakan pengeras suara dalam peribadatnya. Permintaan tersebut dimintakan jemaat Gereja Gidi dengan tertulis ke semua gereja dan masjid.</p>
<p>Surat permintaan tersebut, kata Natalius, ditebuskan ke pihak kepolisian dan pemerintah setempat. Akan tetapi kepolisian dan pemerintah setempat tak mengantisipasi kegiatan keagamaan Gereja Gidi yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri bagi umat Islam. Pada akhirnya, sejumlah kelompok pemuda dari Gereja Gidi melakukan protes ketika gema takbir Idul Fitri berkumandang dari masjid di perkampungan Karubaga, Kabupaten Tolikara. Jemaat Gereja Gidi hendak menyampaikan protes, agar peribadatan umat Islam ketika itu tak menggunakan pengeras suara.</p>
<p>Umat Islam ketika itu hendak mendirikan shalat Ied. Namun, aksi protes jemaat Gereja Gidi dihalau oleh kepolisian yang berjaga di sekitar masjid. Halaun aparat keamanan membuat aksi jemaat Gereja nekat. Sasaran kemarahan sebenarnya ialah aparat kepolisian yang berjaga-jaga di masjid. Kemarahan tersebut direspon dengan tembakan. Diungkapkan Natalius, ada 11 jemaat Gereja Gidi ditembak peluru tajam karena hendak protes. Sampai sekarang, kesebelas pemuda itu masih dirawat. Penembakan tersebut dinilai Natalius semakin memicu amarah jemaat Gereja Gidi. "Terjadilah pembakaran itu. Karena polisi melarang protes di masjid," terang Natalius.</p>

(sumber: nasional.republika.co.id pada tanggal 18 Juli 2015)

Di sini kita dapat melihat perbandingan interpretasi yang berbeda oleh dua media dalam menyikapi soal pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Kelompok HTI cenderung gegabah melihat persoalan tersebut tanpa menampilkan penelusuran sebab akibat pembakaran Masjid Baitul Muttaqin pada 17 Juli 2015 lalu.

2) “Peringatan Panglima TNI: Proxy War!

Wacana merupakan bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Tulisan yang memuat tentang ancaman proxy war, *media online* HTI memiliki akses yang besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. Hal ini dikarenakan tulisan yang ditulis oleh penulis memuat dua orang penting di Indonesia, di antaranya seorang Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Khalayak akan mudah terpengaruh apa yang disampaikan oleh media HTI. Terlebih lagi, *media online* HTI mengajak khalayak untuk mengulas ideologi yang dianggap oleh HTI telah menghancurkan Indonesia. Tulisan tersebut berisi dari komentar Jenderal Gatot Nurmantyo, seorang panglima TNI yang resmi menjabat sejak 8 Juli 2015. Dalam pidatonya, Gatot mengingatkan ancaman perang proksi seperti demo anarkis buruh, tawuran pelajar dan mahasiswa, adu domba TNI-Polri, upaya memecahbelahkan Parpol, rekayasa sosial dengan memanfaatkan media, dan maraknya penyalahgunaan narkoba yang menyerbu seluruh lini kehidupan bernegara, berbangsa, yang sudah hadir dalam kehidupan masyarakat. Tulisan tersebut tidak menampilkan kutipan langsung dari Gatot, penulis menyimpulkan sendiri bahwa yang disampaikan oleh Gatot berhubungan dengan ideologi yang telah menghancurkan Indonesia. Ideologi yang dimaksud ialah kapitalisme, sekulerisme, demokrasi, liberalisme, HAM,

dan pluralisme. Sesuai yang dicermati oleh peneliti, Kelompok HTI memiliki pemahaman yang kontradiktif terhadap ideologi-ideologi yang telah disebutkan di atas. (cek berita lain tentang perang proksi yang disampaikan oleh panglima TNI)

Tak hanya beliau, penulis juga memuat penilaian dari Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengenai fenomena LGBT. Kemunculan LGBT sangat ramai diperbincangkan di Indonesia pada awal tahun 2016. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh artis Indonesia, Saiful Djamil, lalu isu cinta sejenis antara Jessica Kumala Wongso dan Mirna dalam kasus pembunuhan, digadang-gadang memicu terkuaknya fenomena LGBT di Indonesia. Misalnya, acara televisi Indonesia Lawyers Club (ILC) menggunakan situasi tersebut dengan mengusung tema LGBT pada tanggal 16 Februari 2016. Melihat ke belakang, fenomena LGBT juga sudah menjadi hot issue di luar Indonesia. Pada bulan Juni 2015, Barack Obama yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, telah melegalisasi pernikahan sesama jenis. Isu itu menjadi *trending topic* pada berbagai media internasional maupun media nasional yang berlomba-lomba memberitakan mengenai fenomena LGBT ini. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat merupakan negara abdidaya yang menjadi role model dari negara lain. Dalam buku *Anakku Bertanya tentang LGBT* yang ditulis oleh Sinyo, Yosep Adi sebagai Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM mengatakan bahwa diskriminasi pada kaum LGBT masih kental melekat pada seminar

nasional “Seksualitas yang Ditabukan: Tantangan Keberagaman” November 2008 lalu. Menurut Yosep, seharusnya negara ikut bertanggungjawab dalam melakukan sosialisasi tentang keberadaan kaum LGBT, bukan menganggap mereka sebagai sesuatu yang menyimpang. Negara juga harus memastikan pemenuhan kebutuhan perlindungan terhadap kaum LGBT sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama seperti tertuang dalam Deklarasi Umum HAM.

Sesuai penelusuran peneliti, Antara news pernah memuat tulisan mengenai pendapat Menhan, Ryamizard Ryacudu tentang LGBT. Tulisan tersebut diberi judul “Menhan: LGBT bagian proxy war”

Menhan: LGBT bagian `proxy war`

Selasa, 23 Februari 2016 17:25 WIB | 12.168 Views

Pewartanya: Syaiful Hakim

Mantan KSAD, Ryamizard Ryacudu. (ANTARA)

Sejak 15 tahun lalu saya sudah buat (tulisan) perang modern, itu sama modelnya. Perang murah meriah

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia adalah bagian dari *proxy war* atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. "Sejak 15 tahun lalu saya sudah buat (tulisan) perang modern, itu sama modelnya. Perang murah meriah," kata Menhan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa. Menurut dia, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Oleh karena itu, fenomena pendukung LGBT yang meminta komunitasnya dilegalkan itu wajib diwaspadai. "(LGBT) bahaya dong, kita tak bisa melihat (lawan), tahu-tahu dicuci otaknya, ingin merdeka segala macam, itu bahaya," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Ia menjelaskan, perang proksi itu menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. "Kalau perang proksi, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Kalau bom atom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, di Semarang tak hancur. Tapi, kalau perang modern semua hancur. Itu bahaya," paparnya. Ia menambahkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, melainkan menggunakan pemikiran. "Tidak berbahaya perang alutsista, tetapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara," tuturnya.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

sumber: <http://www.antarane.ws.com> pada tanggal 23 Februari 2016

Tulisan tersebut mendeskripsikan citra baik HTI dalam menyelamatkan kesatuan negara Indonesia. Seperti dalam kalimat-kalimat yang telah dituangkan oleh penulis teks tersebut:

Terkait *Proxy War* ini, Hizbut Tahrir Indonesia, telah berulang kali mengingatkan bahkan berkampanye secara massif, sesungguhnya musuh nyata Indonesia adalah Kapitalisme dengan pemikiran pokoknya sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme. Penjajahan ini dipimpin Amerika dengan menggunakan penguasa-penguasa boneka yang mengabdikan dan menjilat tuan Kapitalisnya.

Hizbut Tahrir juga mengingatkan agar menghentikan segala bentuk kerjasama dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Karena merekalah pendukung kapitalisme dan gembong kejahatan di dunia Islam termasuk Indonesia.

Tidak berhenti sampai disana, Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai bagian bangsa ini, sebagai bukti kecintaan kepada Allah SWT, kepedulian terhadap bangsa ini mengingatkan solusi satu-satunya yang bisa menyelamatkan Indonesia adalah syariah Islam dan Khilafah. Hanya dengan menerapkan syariah yang berasal dari Allah SWT-lah kehancuran bangsa ini bisa dihentikan.

3) “KH Kholil Muhammad: Semoga Tak Ada Kiai Nyeleneh Lagi Setelah Gus Dur”

Dalam kerangka model Van Dijk, kita perlu melakukan penelitian bagaimana wacana pluralisme agama diproduksi dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis wacana mengenai pluralisme agama yang berkembang dalam masyarakat. Berita tersebut ditulis oleh redaksi Tempo, lalu *diposting* ulang oleh *media online* HTI. Dikarenakan gambaran tulisan tersebut sesuai dengan cerminan kelompok HTI, membuat *media online* HTI *memposting* ulang dari *media online* sebelumnya. Di sini peneliti tidak menganalisis wacana konteks sosial pada *media online* Tempo, tetapi melihat dasar apa yang melatarbelakangi *media online* HTI menampilkan ulang tulisan tersebut pada laman *websitenya*.

Sebagai kelompok yang kontra dengan ideologi pluralisme agama yang dianut oleh Gus Dur, kelompok HTI memiliki kekuasaan didasarkan pada kepemilikan atas status kelompoknya. KH Kholil Muhammad selaku narasumber pada berita tersebut, menilai pluralisme agama yang diusung oleh Gus Dur sangat berbahaya bagi umat Islam. Penilaian ini sangat sesuai dengan sikap kelompok HTI yang menolak pemahaman pluralisme agama. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan pada *media online* HTI berjudul “Jubir HTI: Pluralisme Bertentangan dengan Prinsip Aqidah Islam” yang *diposting* pada tanggal 12 Januari 2010 lalu. Tulisan tersebut sebenarnya

juga ditulis oleh mediaumat.com, lalu ditampilkan lagi dalam laman *website media online* HTI. Situs mediaumat.com memuat percakapan tanya jawab antara wartawan dan narasumber yang merupakan M. Ismail Yusanto, Jubir HTI. Pada teks berikut terlihat jelas apabila kelompok HTI menolak pemahaman pluralisme agama. Mereka juga memarjinalkan aktor dalam tulisan tersebut, yakni Gus Dur.

Pluralisme, apalagi pluralisme agama, tentu sangat berbahaya. Pertama, secara i'tiqadi paham ini merusak aqidah Islam. Pluralisme agama adalah sejenis sinkretisme, yakni paham yang menyamadudukkan agama. Artinya semua agama menurut paham ini hakekatnya sama. Yang berbeda hanyalah bentuk luarnya atau aspek eksoterisnya saja, sedang aspek esoterisnya atau inti ajaran agama, semuanya sama, yakni menuju kepada Tuhan yang sama. Paham semacam ini jelas bertentangan dengan aqidah Islam karena menurut aqidah Islam hanya Islam saja agama yang benar, yang diridhai Allah SWT, dan barang siapa mencari agama selain Islam pasti tertolak dan di negeri akhirat termasuk orang yang merugi karena pasti akan masuk neraka selama-lamanya. Sementara secara empiris, paham ini membuat orang tidak lagi kokoh memegang aqidah dan syariah Islam, bahkan akan cenderung memusuhi karena menganggap ide penerapan syariah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara misalnya, berarti hanya mengunggulkan agama Islam dari agama lain yang ada. Inilah salah satu faktor yang membuat mengapa upaya penerapan syariah di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim ini terasa begitu sulit karena tak henti ditentang oleh umat Islam termasuk tokoh-tokohnya yang berpandangan pluralisme tadi. Karena itu, fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama sudah sangat tepat, dan bila ada upaya yang ingin menghapus fatwa itu harus tegas ditolak.

Menanggapi pemikiran dan kebijakan Gus Dur, semua harus dikembalikan kepada ketentuan Islam. Apa saja pemikiran dan kebijakan Gus Dur yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, misalnya tentang pluralisme agama, tentang upaya untuk mencabut larangan PKI atau sikap dia yang membela Ahmadiyah dan lainnya, semua itu harus ditolak. Sementara apa saja pemikiran dan kebijakan dia yang baik, yang sesuai dengan aqidah dan syariah, boleh kita dukung. Nah, kini beliau sudah meninggal, kita berharap semoga semua kesalahannya diampuni dan amal baiknya diterima Allah SWT. Amin

Menurut Abd. Moqsith Ghazali dalam bukunya, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persaudaraan antar sesama manusia yang berlainan agama menurut Al-Qur'an. Rasulullah lahir ke dunia bukan untuk membela satu golongan, etnis, dan agama tertentu saja, melainkan sebagai *rahmat li al-alamin*. Tidak ada alasan bagi seorang muslim membenci orang lain karena ia bukan penganut agama Islam. Membiarkan orang lain (*al-akhar*) tetap memeluk agama non Islam adalah bagian dari perintah Islam sendiri. Bahkan toleransi yang ditunjukkan Islam demikian kuat sehingga umat Islam dilarang memaki tuhan-tuhan yang disembah orang-orang musyrik.

Kelompok HTI menilai pemahaman yang diusung oleh Gus Dur ialah mencampur adukkan agama, sebaliknya kelompok NU tidak membenarkan klaim yang diciptakan oleh kelompok HTI. Hal ini dapat diakses pada laman *NU Online* yang berjudul “Jangan Salahartikan Pluralisme Gus Dur”.

Jangan Salahartikan Pluralisme Gus Dur

Selasa, 05 Januari 2010 17:50

Jakarta, *NU Online*

Ketua LDNU KH Nuril Huda meminta agar masyarakat tidak menyalahartikan atau malah memelintir sikap pluralisme Gus Dur sebagai menganggap semua agama sama.

“Pluralisme bagi Gus Dur adalah menghargai orang lain, tetapi tetap

teguh dengan keyakinannya sendiri,” katanya kepada NU Online di Jakarta, Selasa (5/1).

Pluralisme agama, atau menyamakan semua agama sama tidak bisa dilakukan karena masing-masing agama memiliki ajaran sacral dan bersifat spiritual yang menyangkut keyakinannya dengan tuhan yang diyakininya.

Pluralisme, yang diusung Gus Dur, menurutnya merupakan pluralisme sosiologis, dalam arti hubungan kemasyarakatan dengan tetap menghargai keyakinan masing-masing agama (mkf).

sumber: www.nu.or.id pada tanggal 05 Januari 2010

2. *Media Online* NU

a. Analisis Teks

1) “Di Haul, KH Muadz Thohir Ceritakan Keistimewaan Gus Dur”

Tema atau topik yang dikedepankan oleh penulis yang mengatasnamakan Syaiful Mustaqim dan Fathoni adalah keistimewaan Gus Dur. Dalam teks ini didukung oleh beberapa diperhatikan, subtopik tersebut membentuk topik utama berupa keistimewaan Gus Dur. Van Dijk mengatakan bahwa wartawan meliput suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada suatu mental/pikiran tertentu. Elemen wacana skema teks berita yang berbentuk *feature news* ini, diawali dengan pengenalan seorang sahabat karib Gus Dur yang bernama KH Muadz Thohir. Ia ditunjuk sebagai pembicara dalam acara Haul ke enam yang bertema “Mengenang Gus Dur dan Pluralisme Agama”. Acara tersebut bertempat di masjid Arrobbaniyin Kampus Unisnu Jepara. Dilanjut dengan kutipan wawancara yang dikutip dari pembicaraan KH Muadz

Thohir. Penulis menuliskan keistimewaan Gus Dur pada bagian tengah, dan ditutup dengan kutipan wawancara oleh KPU Komisioner Jepara yang gemar membaca intisari-intisari Gus Dur.

Latar peristiwa yang digunakan untuk menyediakan dasar hendak ke mana makna teks dibawa. Dapat dilihat pada kalimat

“dalam hal intelektual, Gus Muadz menyebut Gus Dur merupakan sosok yang kutu buku. Setiap ada buku baru ia mesti membacanya. Bahkan ketika penglihatannya mulai terganggu banyak kerabat Gus Dur yang diminta untuk membacakan buku meski hanya judul dan pendahuluannya saja. “Ini tidak lepas dari kedalaman pemahaman beliau sewaktu masih muda banyak membaca literatur sehingga buku terbaru pun sudah bisa dipahami meski hanya judul dan pendahuluan saja,” tuturnya”.

Penulis memakai latar belakang kegermaran membaca Gus Dur untuk menyajikan teks berita yang bertema keistimewaan Gus Dur.

Peneliti juga menemukan detil yang menggunakan angka dalam kalimat *“Gus Dur muda, kenangannya, beda dengan kebanyakan pemuda yang lain. Dibeberkannya dalam semenit Gus Dur mampu mendaras seribu kata. Padahal sekelas orang jenius hanya mampu membaca 250-500 kata. “Saya hanya bisa membaca 150-200 kata per menit. Kalau Gus Dur membacanya cepat,” tandasnya”.* Penulis memberi tulisan yang detil untuk memperlihatkan bahwa Gus Dur yang disebut sebagai bapak plural, memiliki keistimewaan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Ini juga terlihat pada kalimat yang bertuliskan:

“Ia menegaskan, sebelum membaca orang lain, kita dituntut untuk membaca diri kita masing-masing. Sebelum menyalahkan orang lain kita mesti menyalahkan diri sendiri. “Lihatlah orang lain dari sisi positifnya jangan melihat dari hal negatifnya,” lanjutnya. Bagi dia, Gus Dur merupakan sosok yang sederhana, sosok yang menghargai perbedaan dan masih banyak titel yang disandang oleh guru bangsa ini. Mulai politisi, kiai dan ilmuwan. Ia menambahkan Gus Dur tidak pernah mempunyai beban meskipun dengan orang yang membencinya sekalipun. Gus Dur meyakini orang yang tidak cocok lama-lama kelamaan akan menjadi cocok”.

Menurut peneliti, elemen wacana maksud akan lebih baik dan mudah diamati apabila tulisan yang disajikan memiliki topik yang sama. Peneliti dapat membandingkan antara media A dan media B. Elemen maksud memiliki dua bagian di antaranya, implisit dan eksplisit. Informasi yang menguntungkan jurnalis dapat dilihat secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang tidak menguntungkan akan disembunyikan, disamar, dan implisit. Tanpa memiliki perbandingan dengan tulisan yang diproduksi dengan media lain, peneliti melihat teks tulisan yang menyinggung keistimewaan Gus Dur diuraikan secara jelas.

Koherensi merupakan elemen yang menggambarkan bagaimana peristiwa dihubungkan atau dipandang saling terpisah oleh wartawan. Kata hubung “sebab” dalam kalimat *“kiai asal Pati Jawa Tengah ini menyontohkan shalat yang ditunaikan Gus Dur tidak sama yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sebab mantan Presiden RI ini menurutnya pernah mempunyai riwayat ususnya pernah dipotong hingga 22 cm”* saling berhubungan. Bentuk hubungannya adalah shalat yang ditunaikan Gus Dur tidak sama seperti yang dilakukan kebanyakan orang, ini disebabkan Gus Dur memiliki riwayat ususnya yang pernah dipotong hingga 22 cm. Kalimat tersebut juga masih

dilihat sebagai satu peristiwa, kerana kalimat satu dan dua masih saling berkaitan. Peneliti tidak menemukan koherensi kondisional pada teks tersebut. Ada beberapa kalimat yang memiliki anak kalimat sebagai penjelas dengan menghubungkan kata “yang”. Tetapi, anak kalimat yang terdapat dalam teks tersebut tidak memiliki maksud baik atau buruk. Tak hanya koherensi kondisional, peneliti juga tidak menemukan koherensi pembeda dalam *feature news* tersebut. Pada teks tersebut juga tidak ditemukan elemen wacana pengingkar. Bentuk kalimat yang dipakai dalam teks tersebut adalah bentuk deduktif. Penulis menempatkan inti kalimat di bagian muka, lalu keterangan tambahan ditempatkan pada bagian selanjutnya. Bentuk kalimat tidak hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Kalimat “Gus Dur masih menurutnya adalah tokoh plural yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Sehingga tak salah hingga kini yang berziarah ke makamnya dari berbagai elemen agama” umumnya lebih dipilih daripada “seluruh elemen bangsa disatukan oleh tokoh plural, Gus Dur”. Dengan penempatan posisi kata “tokoh plural” yang ditujukan kepada Gus Dur, ini memberi efek keistimewaan tersendiri saat tokoh plural yakni Gus Dur menjadi subjek dalam kalimat tersebut.

Pemakaian kata ganti yang jamak seperti “kita” memiliki implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, serta mengurangi kritik dan oposisi kepada diri sendiri. Seperti yang terdapat pada kalimat “*di Irak ada Haul Gus Dur. Di Brunei dan Malaysia juga ada peringatan Gus Dur. Sehingga jika kita tidak menghauli Gus Dur itu "keterlaluhan", "jelasnya"*”.

Kata “kita” ditunjukkan kepada orang-orang yang mengidolakan Gus Dur atau orang yang memiliki rasa simpati kepada tokoh plural tersebut. Dalam teks ini tidak ditemukan kata ganti lain, seperti kata “mereka”. Peneliti melihat teks yang diproduksi oleh *media online* NU tersebut tidak menciptakan jarak bagi orang-orang yang tidak mengidolakan Gus Dur.

Elemen wacana leksikon dalam teks media tersebut dapat dilihat dalam kalimat “kegiatan Haul yang dikemas ala pengajian A'wan PBNU ini menyatakan KH Abdurrahman Wahid merupakan sosok yang "kontroversial" baik secara keilmuannya maupun ibadahnya”. Penulis menggunakan kata “kontroversial” dengan tanda petik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kontroversial” artinya bersifat menimbulkan perdebatan atau pertentangan. Seperti yang kita tahu, Gus Dur merupakan tokoh yang kontroversial karena pandangannya yang plural. Kata tersebut dapat menjadi perhatian khusus dari pembaca *website* NU. Kata “mendaras” yang terdapat dalam kalimat “*dibeberkannya dalam semenit Gus Dur mampu mendaras seribu kata*” tidak sering digunakan dalam sebuah tulisan. “Daras” berasal dari kata kerja “mendaras”. Kata ‘mendaras’ di sini memiliki maksud bahwa Gus Dur mampu melancarkan bacaan seribu kata dalam semenit. Kata “mendaras” sebenarnya dapat juga digantikan dengan “membaca”. Tetapi, kata “mendaras” dirasa lebih istimewa oleh penulis. Sebab, “mendaras” juga memiliki arti mempelajari dengan sungguh-sungguh, sedangkan kata kerja “membaca” belum tentu sungguh-sungguh. Ini ditonjolkan sebagai keistimewaan Gus Dur sesuai topik umum dari teks tersebut.

Dalam wacana berita, grafis biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Kalimat “Mengenang Gus Dur dan Pluralisme Agama” dibuat berbeda karena diberikan tanda petik. Efek tersebut mengekspresikan dua orang penulis yang mengajak pembaca untuk memerhatikan tema dari kegiatan acara Haul tersebut. Dan kata “keterlaluhan” yang terdapat dalam dua alinea, juga diikuti dengan pemberian tanda petik. Teks tersebut tertuliskan bahwa kalau kita tidak menghauli Gus Dur itu “keterlaluhan”. Pemakaian tanda petik digunakan untuk menguatkan kata “keterlaluhan” apabila kita tidak menghauli Gus Dur. Kata “selalu hidup” juga dipakai tanda petik oleh penulis. “*Gus Dur bagi Subchan Zuhri, Sekretaris IKA PMII Jepara tidak pernah mati dan "selalu hidup". Terbukti dengan pemikiran-pemikirannya terus dikaji hingga sekarang*”. Walaupun kata “selalu hidup” merupakan kutipan pembicaraan narasumber dari berita tersebut, wartawan memiliki kesadaran dalam memberikan tanda petik agar khalayak tertarik.

Pada struktur wacana mikro, hal yang tidak kalah penting untuk diamati adalah elemen wacana metafora. Berita yang berjudul “*Di Haul, KH Muadz Thohir Menceritakan Keistimewaan Gus Dur*”, tidak ditemukan elemen metafora yang ditulis oleh wartawan. Hanya saja, peneliti menemukan petuah yang berasal dari KH Muadz Thohir selaku pembicara dalam mengisi kegiatan tersebut. Seperti yang terdapat dalam kalimat “*ia pun ingat betul akan petuah Gus Dur bahwa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran tidak menyebut spesifikasi buku yang dibaca. "Kita mesti membaca apa*

saja. Bisa buku, maupun lingkungan maupun membaca alam," urainya".

Menurut peneliti, belum relevan apabila ini disebut sebagai wacana metafora, secara kebetulan juga narasumber dalam berita memberikan petuah sahabatnya yaitu Gus Dur.

2) "Memahami Isi dan Kemasan, Bagaimana Kita Harus Bersikap?"

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa teks tersebut menggambarkan tentang bersikap untuk membedakan substansi dan bentuk. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Beberapa subtopik dalam tulisan yang berbentuk opini ini adalah perlakuan terhadap simbol keagamaan yang mengandung kegaduhan; perbedaan substansi dan makna harus diperhatikan saat memandang agama serta budaya yang masih tumpah tindih. Jika dilihat, subtopik tersebut dapat memperkuat bentuk topik umum atau tema yaitu cara menyikapi perbedaan substansi dan bentuk. Umumnya teks atau wacana memilikiskema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. *Lead* dalam opini yang ditulis oleh Yunizar Ramadhani dapat dilihat dalam paragraf pertama,

"kegaduhan menjadi fenomena yang nampaknya selalu menghiasi kehidupan muslim Indonesia, terlebih jika itu menyangkut simbol-simbol agama. Masih menggema sampai saat ini soal penulisan kalimat "insya Allah" yang dianggap keliru dan "in sha Allah" dikatakan sebagai penulisan yang benar. Sebelumnya publik juga heboh menyikapi lantunan kitab suci al-Qur`an dengan langgam jawa. Saya juga masih ingat keributan yang terjadi sekitar sepuluh tahun yang lalu tentang logo perusahaan Unilever yang memuat kata "subhanallah" tertera di produk-produk kamar mandi dan dianggap menghina Islam. Baru-baru ini kaum muslim kembali gaduh gara-gara kostum seorang artis muda yang mencantumkan tulisan Arab "al-Muttahidah" yang sebenarnya berarti "persatuan" (Inggris: United). Beruntung Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa itu bukan

tulisan al-Qur`an melainkan tulisan Arab biasa. Akan tetapi kaum muslim awam terlanjur jengkel dengan adanya tulisan di kostum artis yang sensual itu mengingat bahasa Arab adalah bahasa al-Qur`an dan al-Qur`an adalah kitab suci agama Islam”.

Tulisan tersebut diawali dengan lead sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk ke dalam inti gagasan yang ingin ditulis oleh si penulis. Menurut Van Dijk, apa yang diungkapkan dalam *lead* dan menjadi gagasan utama dalam teks tulisan akan diikuti dan didukung oleh bagian skema lain. Penulis mencoba menyambungkan peristiwa-peristiwa yang tertuang dalam *lead* dengan membahas kesulitan dalam membedakan antara substansi dan makna dapat menimbulkan pemikiran fundamentalis, dilanjutkan dengan jalan pemikiran radikal serta terorisme. Skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu dengan menyusun bagian-bagian tertentu. Meskipun penulis bukan bagian dari redaksi NU *online*, peneliti dapat melihat pandangan penulis yang mendukung isu keberagaman agama. Tulisan yang dapat *diposting* pada sebuah media juga tidak mudah, redaksi memiliki banyak pertimbangan untuk menampilkan karya si penulis. Penulis merupakan bagian dari anggota Forum Keberagaman Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Tengah. FKUB merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama. Dengan demikian penulis memiliki tujuan yang sama dengan kelompok NU dalam menghadapi isu pluralisme agama.

Latar peristiwa digunakan untuk menyediakan dasar hendak ke mana makna teks dibawa. Misalnya, dalam kalimat

“peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dan peristiwa-peristiwa menyangkut perlakuan terhadap simbol keagamaan lainnya yang mengundang reaksi gaduh, semakin memperlihatkan bahwa kaum muslim dewasa ini memiliki masalah dalam membedakan antara substansi dan bentuk, antara isis dan kemasan, antara makna dan simbol, antara yang tetap dan yang berubah, antara baqa’ dan fana’. Kesulitan melakukan pembedaan inilah yang lambat-laun akan melahirkan cara berfikir fundamentalis dan secara bertahap memuluskan jalan pikiran radikal dan terorisme yang hasilnya bisa kita saksikan baru-baru ini”.

Pemberian latar seperti ini akan membentuk kesadaran pembaca bahwa apabila salah menyikapi perbedaan substansi dan makna akan menggiring publik ke arah pemikiran fundamentalis, radikal, bahkan terorisme.

Detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak.

Contohnya, dalam paragraf

“pembedaan substansi dan bentuk juga harus menjadi perhatian kita saat memandang agama dan budaya yang dalam pandangan kaum muslimin saat ini masih tumpang-tindih. Terkadang budaya dianggap sebagai agama dalam makna spiritualitasnya dan budaya dianggap sebagai agama. Memang benar bahwa agama dan budaya tak dapat dipisahkan, sebab agama adalah “produk langit” yang bersifat abstrak. Saat turun ke dunia agama memerlukan “produk bumi” yang untuk mewujudkan secara konkrit dalam bentuk budaya, seperti bahasa, pakaian, adat-istiadat, kearifan lokal, seni, dan lain-lain. Al-Qur`an sendiri memerlukan bahasa Arab agar ia dapat dipahami secara jelas bagi penduduk bumi yang di sanalah ia turun secara berangsur-angsur (QS.13:37, QS.20:113, QS.26:192-195). Sejak itulah kemudian agama dan budaya saling mempengaruhi. Sebenarnya tanpa perlu diasimilasikan pun agama dan budaya secara alamiah akan selalu saling mempengaruhi, komponen-komponennya saling bertukar, namun justru upaya memisahkan keduanya adalah langkah gegabah. Namun tak kalah gegabah pula jika menganggap budaya adalah agama dan agama adalah budaya, sebab “produk bumi” bukanlah “produk langit”, begitu pula sebaliknya. Jika langkah demikian dilakukan sama saja kita memaksa bumi menjadi langit dan langit menjadi bumi dan itu tentu mustahil. Nabi Musa yang ingin melihat Tuhan dengan mata lahirnya jatuh pingsan karena mata lahir sebagai simbolisasi “produk bumi” tak sanggup melihat penampakanNya yang

“berada” di langit (QS.7:143). Karena itulah mustahil bagi langit untuk dipersamakan dengan bumi sehingga Tuhan pun hanya bisa hadir di bumi dengan wajah-Nya (QS.2:115). Jadi, Agama dan budaya bersatu dari segi praktik, tapi terpisah dari segi ide.”

Informasi yang disajikan oleh penulis juga jelas. Dalam penggalan paragraf tersebut, penulis memaparkan cukup jelas tentang perbedaan substansi dan bentuk dalam memandang agama dan budaya. Ia juga menyertakan petunjuk Al-Qur’an untuk menguatkan pendapatnya.

Pertalian atau jalinan antarkata disebut dengan koherensi. Elemen wacana koherensi mampu melihat bagaimana seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Pemakaian kata hubung “dan”, seperti *“kesulitan melakukan perbedaan inilah yang lambat-laun akan melahirkan cara berfikir fundamentalis dan secara bertahap memuluskan jalan pikiran radikal dan terorisme yang hasilnya bisa kita saksikan baru-baru ini”* dipandang sebagai peristiwa yang terpisah oleh penulis. Dua buah kalimat itu menjadi berhubungan sebab akibat ketika dihubungkan dengan kata hubung “menyebabkan” sehingga kalimatnya menjadi *“kesulitan melakukan perbedaan inilah yang lambat-laun akan melahirkan cara berfikir fundamentalis sehingga menyebabkan secara bertahap memuluskan jalan pikiran radikal dan terorisme yang hasilnya bisa kita saksikan baru-baru ini”*.

Di sini penulis memandang cara berpikir fundamentalis tidak semua menyebabkan memuluskan jalan radikal dan terorisme, sehingga peneliti memberi konjungsi “dan”.

Koherensi kondisional ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Kalimat kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama, yang dihubungkan dengan kata hubung “yang” atau “dimana”. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan elemen wacana koherensi kondisional pada teks tersebut yang *diposting* pada NU *online* pada tanggal 08 Februari 2016. Tulisan yang mengandung teks tanpa koherensi menandakan bahwa penulis tidak memiliki maksud tersembunyi dalam mengekspresikan tulisannya. Peneliti juga tidak menemukan koherensi pembeda dalam tulisan tersebut.

Pengingkaran adalah sebuah elemen di mana kita dapat membongkar sikap atau ekspresi wartawan yang disampaikan secara tersembunyi. Pengingkaran menunjukkan seolah wartawan menyetujui sesuatu, padahal ia tidak setuju dengan memberikan argumentasi atau fakta yang menyangkal persetujuan tersebut. Dalam tulisan yang berjudul “Memahami Isi dan Kemasan, Bagaimana Kita Harus Bersikap?” disampaikan wartawan secara jelas tanpa ada yang disembunyikan.

Pemakaian kata ganti “kita” dalam tulisan ini mengartikan apa yang menjadi sikap penulis seolah-olah juga menjadi sikap pembaca. Ini juga menunjukkan tidak ada batas antara wartawan/komunikator dengan pembaca. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kalimat

“kedepan, kita berharap lebih bijak dalam menyikapi pelbagai persoalan yang menyangkut simbol-simbol keagamaan khususnya dan yang menyangkut keagamaan lainnya, seperti tata cara menjalankan ibadah, ijtihad dalam memutuskan hukum-hukum Fiqih, hubungan agama dan negara, pluralisme agama, dan lain-lain. Dalam memandang bidang-bidang itu pembedaan antara substansi dan bentuk adalah premis umum yang layak diperpegangi.

Agama telah mengajarkan kita untuk lebih mementingkan akhirat daripada dunia, substansi daripada bentuk, isi daripada kemasan, makna daripada simbol, yang tetap daripada yang berubah, baqa` daripada fana`, sebab jika sebaliknya maka kita berada dalam kesesatan yang jauh (QS.14:3)”.

Kata “*produk langit*” dan “*produk bumi*” dapat dikatakan sebagai elemen wacana leksikon. Penulis menggunakan kata “*produk langit*” untuk menyebutkan agama, sedangkan “*produk bumi*” untuk menyebutkan budaya. Seperti yang terlihat dalam tulisan ini,

“memang benar bahwa agama dan budaya tak dapat dipisahkan, sebab agama adalah “produk langit” yang bersifat abstrak. Saat turun ke dunia agama memerlukan “produk bumi” yang untuk mewujudkan secara konkrit dalam bentuk budaya, seperti bahasa, pakaian, adat-istiadat, kearifan lokal, seni, dan lain-lain”.

Penulis berpendapat bahwa “*produk bumi*” dan “*produk langit*” tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi.

Peneliti juga tidak menemukan elemen wacana anggapan, sebab opini yang ditulis oleh si penulis kenyataannya pernah terjadi, dan didasari dengan petunjuk Al-Qur’an. Selanjutnya, pemakaian ilustrasi menggambarkan enam orang berbeda yang memiliki keyakinan berbeda pula. Di antaranya orang Hindu, orang Kristen, orang Amish, orang Yahudi, orang Islam, dan orang Budha merupakan bagian dari elemen wacana grafis. Gambar tersebut mendeskripsikan substansi dan bentuk dari orang yang berkeyakinan yang berbeda-beda. Kata “*toh*” dalam kalimat “*akan tetapi, tentu saja, keduanya berbeda dan hamba Allah mesti mendahulukan yang satu, yakni akhirat, daripada yang lain, yaitu dunia. Toh, ketika coklat habis dimakan kemasannya pun dibuang*” dicetak miring, sehingga kata tersebut juga dapat disebut bagian dari elemen grafis. Kata “*toh*” merupakan kata

afektif sebagai penguat maksud. Selebihnya, penulis menggunakan kata cetak miring ketika menuliskan identitasnya. Hal ini untuk meyakini kepada pembaca bahwasannya ia orang yang relevan dalam menulis tulisan tersebut sesuai kelompok organisasinya yaitu FKUB. Dan penulis juga menggunakan cetak miring dalam menulis kata yang berasal dari bahasa arab.

Penulis menggunakan petunjuk dari ayat-ayat suci pada tiap opininya. Ini berupa tanda buka kurung, identitas ayat, dan tutup kurung. Misalnya dalam kalimat,

“kehidupan dunia jelas tidak boleh diabaikan karena memang kita sekarang sedang menjalaninya dan Allah sendiri memang membuat dunia ini indah dalam pelbagai bentuk kenikmatan, tapi Allah memiliki tempat yang lebih baik untuk ditinggali (QS.3:14). Karena itu, hamba Allah harus menyadari betul bahwa akhirat adalah kekekalan yang lebih baik (QS.5:32, QS.17:21, QS.87:17) dan karena itu apapun yang kita usahakan di dunia harus terpusat kepada akhirat”.

Meskipun penulis tidak menuangkan secara langsung surah Al-Qur’an dalam tulisannya, ini juga telah menunjukkan kalau penulis menggunakan ayat-ayat suci sebagai ornamen atau bumbu dari opininya.

3) “Tiga Perguruan Tinggi AS Belajar ke PBNU”

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Teks berita yang masuk dalam kategori *straight news* ini, menggambarkan kunjungan enam perguruan tinggi yang berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia untuk belajar pluralisme ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Perguruan tinggi yang berasal dari Amerika Serikat ditulis *typo* oleh si penulis. Seperti dalam kalimat ini *“menerima kunjungan belasan*

mahasiswa dari tiga perguruan tinggi Amerika Serikat, yakni University of Michigan, Goucher College, dan Goucher College". Penulis yang bernama Mahbib khoiron menyebutkan *Goucher College* dua kali. Peneliti menilai jika penulis tidak teliti atau dari pihak redaksi belum mengeditnya. Peneliti yakin bahwa penyebutan salah satu "*Goucher College*" diganti dengan *Lehigh University USA*. Hal ini berdasarkan penelusuran peneliti dalam mencari berita mengenai kunjungan mahasiswa AS. Berita tersebut terdapat dalam *website NU Online* yang berjudul "Mahasiswa AS Belajar Islam di Darul Ulum Jombang".

"Wakil Rektor Unipdu Jombang Zulfikar As'ad, Kamis mengatakan para mahasiswa itu berasal dari "Michigan University" dan "Lehigh University USA". Mereka datang untuk belajar tentang Islam". "Para mahasiswa dari Amerika ini datang untuk belajar tentang Islam dan pluralisme agama di Jawa Timur pada 11-15 Juni. Setelah mengunjungi Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, mereka akan mendampingi tujuh mahasiswa Indonesia dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI) untuk belajar hal yang sama di Amerika Serikat".

Dua paragraf di atas dapat menjawab kesalahan penulis dalam menulis berita. Seharusnya penulis menyebutkan *University of Michigan, Goucher College, dan Lehigh University AS*.

Secara hipotetik berita memiliki dua kategori skema besar. Pertama, *summary* yang ditandai dengan dua elemen yakni judul dan *lead*. Kedua, *story*, yaitu isi berita secara keseluruhan. Judul berita yang diteliti oleh peneliti adalah "Tiga Perguruan Tinggi AS Belajar Pluralisme ke PBNU". Lead ini umumnya sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum

masuk dalam isi berita secara lengkap. Lead atau teras berita tampak pada paragraf pertama

“pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (4/6) sore, menerima kunjungan belasan mahasiswa dari tiga perguruan tinggi Amerika Serikat, yakni University of Michigan, Goucher College, dan Goucher College; serta tiga universitas dalam negeri, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga”.

Teras berita yang menempati paragraf pertama harus menggambarkan pokok terpenting berita. Isi berita tersebut mengenai proses jalannya kunjungan teman-teman mahasiswa ke kantor PBNU. Seperti, mereka disambut oleh ketua PBNU H Iqbal Sulam, Sekretaris Lembaga Ta’Mir Masjid NU (LTMNU) Ibnu Hazen, dan ketua lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBINU) Avianto Muhtadi. Terdapat juga komentar pihak-pihak yang terlibat, misalnya komentar Junaidi selaku koordinator kunjungan dan komentar Iqbal mengenai isu pluralisme yang ditanamkan oleh NU.

Peneliti tidak menemukan latar peristiwa dalam tulisan tersebut. Wartawan dapat menyajikan latar belakang dapat juga tidak, tergantung pada kepentingan mereka. Elemen detil merupakan strategi bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Wacana yang dikembangkan oleh wartawan kadangkala tidak perlu disampaikan secara terbuka, tetapi dari detil bagian mana yang dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan detil yang besar, akan menggambarkan bagaimana wacana yang dikembangkan oleh media. Elemen detil terlihat dalam kalimat

“iqbal di hadapan para mahasiswa ini mempresentasikan secara singkat sejarah, peran, jamaah, pesantren, amal usaha, dan hal-hal lain yang terkait dengan NU baik dari segi budaya maupun organisasi. Ia menegaskan, ormas Islam yang berdiri 1926 tersebut menghargai keragaman suku, agama, dan budaya di Tanah Air. Iqbal menambahkan, jihad adalah perjuangan untuk melawan kolonialisme, dan bukan untuk memusuhi kelompok berbeda”.

Tidak seperti paragraf lainnya, penulis menguraikan bagian tersebut secara panjang lebar. Ia menguraikan secara detil terkait eksistensi kelompok NU selama ini dan menjelaskan bahwa NU menghargai keberagaman baik itu suku, agama, dan budaya, serta penambahan penjelasan mengenai jihad yang selama ini diartikan salah. Informasi yang disajikan oleh penulis, menurut peneliti cukup dikatakan dengan jelas, tanpa ada yang disembunyikan.

Dalam keseluruhan teks berita, peneliti tidak menemukan elemen koherensi. Selain itu, tulisan tersebut juga tanpa koherensi kondisional. Berita ini juga tidak menggunakan kata “bandingkan” untuk menunjukkan elemen wacana koherensi pembeda. Peneliti melihat tulisan ini tidak menimbulkan konflik bagi kelompok lain. Walaupun penulis merupakan bagian dari media NU *online*, ia tidak pernah membandingkan satu realitas dengan realitas lain.

Uraian kalimat dalam teks berita tersebut termasuk pendek. Penulis memakai kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca pada umumnya. Penulis menyampaikan informasi secara terbuka dan jelas, tanpa menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan secara implisit oleh si penulis. Bentuk kalimat aktif terlihat dalam alinea pertama

“pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (4/6) sore, menerima kunjungan belasan mahasiswa dari tiga perguruan tinggi Amerika Serikat,

yakni University of Michigan, Goucher College, dan Goucher College; serta tiga universitas dalam negeri, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga”.

Dalam kalimat ini, PBNU menjadi subjek dari pernyataannya. Hal ini menjadi strategi penulis untuk memerhatikan kata “PBNU”, sebab pokok yang dipandang penting terletak pada awal kalimat.

Peneliti juga menemukan kalimat aktif dalam kalimat *“ia menegaskan, ormas Islam yang berdiri 1926 tersebut menghargai keragaman suku, agama, dan budaya di Tanah Air. Iqbal menambahkan, jihad adalah perjuangan untuk melawan kolonialisme, dan bukan untuk memusuhi kelompok berbeda”*. Kalimat *“ormas Islam yang berdiri 1926 tersebut”* yang ditujukan kepada kelompok NU menempatkan posisi NU sebagai subjek. Perlu diketahui, bentuk kalimat bukan hanya persoalan teknis tata bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Bentuk kalimat dalam berita ini bersifat deduktif. Inti kalimat mengenai kunjungan belasan mahasiswa ke kantor PBNU ditempatkan di bagian muka, kemudian disusul dengan keterangan tambahan mengenai NU, dan diakhiri dengan pernyataan bahwa rombongan mahasiswa akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta, setelah dari kantor PBNU.

Tulisan yang *diposting* pada tanggal 04 Juni 2014 lalu, kata ganti “kami” ditemukan dari kutipan wawancara koordinator kunjungan. *“Kami berkunjung ke sini dalam rangka ingin belajar tentang NU mengenai pluralisme agama dan masyarakat demokrasi,” ujar Junaidi, koordinator kunjungan*”. Kata ganti “kami” dalam berita tersebut hanya berjumlah satu

dan digunakan dalam kutipan wawancara. Sebaliknya penulis tidak memakai kata ganti lain. Peneliti juga tidak mendapatkan pilihan kata yang menunjukkan ideologi tertentu. Begitu juga dengan elemen wacana praanggapan.

Dalam wacana berita, elemen grafis dapat ditemukan dalam pemakaian foto atau gambar dalam sebuah teks. Foto yang dilampirkan oleh penulis, memperlihatkan beberapa pengurus Nahdlatul Ulama dan belasan mahasiswa yang terlibat sedang melakukan sesi foto bersama. Dapat diprediksikan bahwa gambar tersebut diambil setelah presentasi selesai. Ini sebagai bukti kepada pembaca bahwa kunjungan tersebut benar adanya. Pada akhir tulisan, peneliti melihat nama penulis yang dicetak tebal. Umumnya nama penulis baik itu nama asli atau nama pena dicetak tebal untuk memperlihatkan kepada pembaca identitas komunikator. Berita yang berjumlah 286 kata itu, juga tidak menggunakan bumbu atau ornamen dalam suatu berita.

b. Analisis Kognisi Sosial

Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Pada elemen ini dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan mengapa teks bisa seperti itu. Suatu teks dapat seperti itu karena lahir dari kognisi atau kesadaran mental di antara wartawan bahkan dari masyarakat yang memandang seperti itu. Peneliti melihat produksi teks oleh

salah satu redaktur *media online* NU, yang disebut Soeara Nadhlatoel Oelama. Ia adalah Muhammad Yunus, seorang redaktur sekaligus editor media tersebut. Sebelumnya Yunus memegang andil pada radio NU, dan pada dua tahun terakhir ini fokus pada NU *online*. Menurutnya, dalam hal pemberitaan keislaman baik itu artikel dan bentuk tulisan lainnya sesuai dengan perspektif NU.

“Karena kita portal berita ya sebenarnya hampir sama secara keseluruhan. Cuma kontennya memang seputar keislaman dan ke-NU-an. Jadi, soal prinsip jurnalistik tetap menjadi patokan, selanjutnya terkait dengan *framing*, ya menggunakan *framing* NU”.¹⁹

Dalam percakapan wawancara, Yunus juga mengatakan bahwa kelompok NU menerima paham pluralisme walaupun paham tersebut masih menjadi perdebatan. Kelompok NU memandang dan menggambarkan kelompok Islam sempalan, seperti HTI dengan sikap tegas.

“Iya, prinsip NU apalagi sekarang ini sudah jelas bahwa ketika ada kelompok sempalan misalnya semacam HTI yang tujuannya memang tidak baik bagi kehidupan bernegara negara kita, ya sikap NU ya tegas. Bahkan meminta pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan Perppu tentang Ormas, itu NU sangat mendukung. Karena NU sebelumnya juga sudah meminta pemerintah segera membubarkan Ormas tersebut. Nah yang menjadi dasar NU adalah karena Ormas tersebut tidak sejalan dengan keindonesiaan. Kita semua sudah tahu bahwa HTI memiliki dasar dan prinsip untuk mengubah haluan negara. Dan itu yang menjadi pegangan NU untuk meminta pemerintah untuk membubarkan Ormas tersebut. Nah, di luar itu seandainya ada Ormas yang dakwah dan sebagainya tidak dipermasalahkan, NU sudah terbiasa dengan

¹⁹ Muhammad Yunus, wawancara pribadi via telepon seluler pada tanggal 25 Juli 2017

*kelompok-kelompok yang beda pemikiran itu sudah biasa gitu. Tetapi, ketika ada kelompok yang mengancam kedaulatan negara dan NKRI, ya NU tegas meminta pemerintah untuk membubarkan”.*²⁰

Dalam wawancara tersebut, peneliti melihat kelompok NU memiliki perspektif keberagaman dalam memandang suatu peristiwa. Mereka tidak menutup ruang kelompok minoritas dengan memproduksi sebuah tulisan yang tidak berkonten Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA). Sehingga dalam berita yang diproduksi, kelompok NU tidak bias pluralisme dalam memproduksi sebuah tulisan. Muhammad Yunus sebagai redaktur *media online* juga memandang bahwa kelompok HTI berseberangan dengan prinsip negara.

*“Wah ini subjektif. Hmm saya melihat ya web HTI itu ya memang menyampaikan visi misi terus berbagai informasi terkait dengan kegiatan Hizbut Tahrir. Sebenarnya tidak ada masalah ketika dia berada di jalur dakwah, gitu. Saya juga pernah bersentuhan dengan teman-teman HTI di kampus, mereka diskusi dakwah it’s okay tidak ada masalah. Tetapi, di beberapa kesempatan situs HTI juga pernah, beberapa kali lah memposting dengan jelas bahwa mereka ingin merubah NKRI dengan menawarkan khilafah sebagai solusinya. Jadi, segala sesuatu dikembalikan kepada sistem khilafah. Ini jelas bertentangan, ketika juru bicara HTI pak Ismail Yusanto mengatakan bahwa kami tidak pernah menyampaikan ingin mengubah dasar negara, tetapi faktanya sudah banyak sekali yang menghimpun data itu bahwa HTI di beberapa kesempatan memang memposting tentang cita-cita merubah dasar negara itu. Kalau sekarang sebagian besar sudah dihapus, saya lihat”.*²¹

Seperti yang dijelaskan oleh Yunus, NU *online* memiliki kontributor sekitar 70 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihak redaksi

²⁰ Muhammad Yunus, wawancara pribadi via telepon seluler pada tanggal 25 Juli 2017

²¹ Muhammad Yunus, wawancara pribadi via telepon seluler pada tanggal 25 Juli 2017

NU sendiri memiliki kontributor yang dominan berasal dari orang NU dan kelompok yang memiliki kesamaan perspektif.

“Kita sebenarnya tidak mendasarkan itu, tetapi mayoritas teman-teman kontributor NU online ya memang orang-orang NU. Teman-teman kontributor itu biasanya aktivis Ibnu Anshor, FKUB, Fatayat, mereka aktif di organisasi kepemudaan NU. Dan biasanya awalnya cuma mengirim berita yang terkait dengan kegiatan mereka, misalnya anak Ibnu bikin acara apa, kemudian mereka mengirim berita kegiatan tersebut. Seiring waktu mereka juga meliput kegiatan-kegiatan lain dan ketika sudah menjadi bagian kontributor maka pemberitaan-pemberitaan seputar NU terkait dengan isu nasional yang terkait dengan umat Islam, mereka mengirim berita dengan narasumber berita yang dia peroleh dari wilayahnya.”²²

Dari elemen ini kita dapat melihat bagaimana kesadaran mental seorang penulis dan seperti apa konstruksi penulis dalam memaknakan sebuah peristiwa. Peneliti melihat redaksi NU *online* memandang isu pluralisme dengan terbuka tanpa menyudutkan satu sama lain. Ketika peneliti menyinggung sikap Yunus dalam memahami isu pluralisme agama, ia mengatakan kita harus menghargai sebuah perbedaan.

“Ya kita harus menghargai sebuah perbedaan. Masing-masing kita menghormati, masing-masing menghargai. Menurut saya pribadi, pluralisme semacam itu. Saya punya keyakinan Islam, teman-teman punya keyakinan Kristen, Hindu dan Budha, iya sama-sama punya keyakinan. Poin penting dari pluralisme adalah hidup bersama dalam harmoni, gotong royong, rukun, dan sebagainya. Itu adalah poin utama dari pluralisme. Jadi, bukan berarti pluralisme membenarkan dan mencampuradukkan agama tertentu, masing-masing individu punya prinsip yang dipegang dan biarkan prinsip itu menjadi keyakinannya tanpa perlu dicampur dan tanpa perlu dibenturkan.”²³

c. Analisis Konteks Sosial

1) “Di Haul, KH Muadz Thohir Ceritakan Keistimewaan Gus Dur”

²² Muhammad Yunus, wawancara pribadi via telepon seluler pada tanggal 25 Juli 2017

²³ Muhammad Yunus, wawancara pribadi via telepon seluler pada tanggal 25 Juli 2017

Dalam wacana konteks sosial, peneliti mencoba melihat kiprah pemikiran Gus Dur menggunakan pendekatan historis. Ini berguna untuk meninjau pemahaman pluralisme agama yang diusung oleh Gus Dur.

Amien Rais menyebut Gus Dur sebagai ikon pluralisme di Indonesia. Beliau menilai Gus Dur berhasil membawa NU dari kondisi marginal menjadi arus utama atau *mainstream* gerakan sosial politik di Indonesia. Menurut pengakuan Amien, Gus Dur sebagai anak bangsa yang berhasil memajukan pondok pesantren menjadi lebih terbuka, dan mendorong partisipasi pesantren dalam pembangunan nasional dan dunia Islam.²⁴ Gus Dur tidak hanya tokoh besar yang dikenal bangsanya, tetapi juga kiprah, pemikiran, dan perjuangannya dalam menegakkan demokrasi, HAM, pluralisme, dan kesetaraan.²⁵

Keterlibatan Gus Dur baru terjadi di organisasi NU pada tahun 1979 atau setelah berlangsungnya Muktamar NU di Semarang. Ia baru bersedia bergabung dengan NU setelah kakeknya, Kyai Bisri Syamsuri, meminta untuk ketiga kalinya bergabung ke NU. Gus Dur tidak kuasa lagi menolak dan akhirnya resmi masuk dalam struktural Pengurus Besar NU dengan jabatan Khatib Awal atau Sekretaris I. Pada pemilihan umum 1982, Gus Dur mendapat pengalaman politik pertamanya. Waktu itu, ia ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil 4 fusi partai Islam termasuk NU. Dan pada waktu itu pula, Gus Dur sudah mengkritik pemerintah dengan

²⁴ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 128

²⁵ *Ibid.*, hal 150

tajam dan menyebut bahwa pemerintah selalu mengganggu kampanye PPP dan ingin menangkap orang seperti dirinya. Uniknya, Gus Dur selalu berhasil lolos karena ia memiliki hubungan dengan orang-orang penting di pemerintahan, contohnya dengan Panglima ABRI masa itu, Jenderal Benny Moerdani.²⁶

Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PBNU pada Muktamar NU tahun 1984. Terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU dinilai positif oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila sebagai ideologi negara bersamaan dengan citranya sebagai seorang moderat yang disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Presiden Soeharto menjadikan Gus Dur salah seorang indoktrinator Pancasila. Di awal-awal masa jabatannya memimpin NU, kiprah Gus Dur sebagai tokoh pluralis dan lintas batas sudah mulai terasa. Hal pertama yang dilakukannya adalah mereformasi sistem pendidikan pesantren dan ia berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga setara dengan pendidikan di sekolah umum. Kiprahnya sebagai tokoh lintas batas diperlihatkan ketika pada tahun 1987 ia mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur, yang menyediakan forum untuk mendiskusikan dan menyediakan inetrpretasi teks-teks Islam. Pada masa-masa ini, langkah Gus Dur mulai dianggap kontroversial. Ia sempat menghadapi banyak kritik dan hujatan karena

²⁶ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 10

dianggap ingin mengubah salam umat Islam, yaitu “*Assalamualaikum*” menjadi salam nasional, “*Selamat Pagi*”.²⁷

Pada tahun 1989, NU kembali mengadakan Muktamar dan Gus Dur kembali terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU untuk masa jabatan kedua. Pada saat itu, Soeharto yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati kalangan Muslim untuk mendapat dukungan kalangan Islam. Salah satu bentuk dari upaya Presiden Soeharto menarik dukungan umat Islam itu adalah dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada bulan Desember 1990. Tahun 1991, sejumlah anggota ICMI meminta Gus Dur ikut bergabung. Tetapi, Gus Dur menolak karena ia beranggapan ICMI akan menjadi sektarian dan akan membuat posisi Presiden Soeharto tetap kuat. Tahun 1994, NU kembali menyelenggarakan Muktamar dan Gus Dur kembali pula mencalonkan diri. Soeharto tidak ingin Gus Dur terpilih kembali. Jauh-jauh hari sebelum Muktamar berlangsung, sejumlah menteri pendukung Soeharto mulai berkampanye agar Gus Dur tidak terpilih kembali. Ketika Muktamar berlangsung, arena Muktamar dijaga ketat oleh ABRI yang disertai tindakan intimidasi dan usaha menyuap anggota NU peserta Muktamar untuk tidak memilih Gus Dur. Namun, usaha Presiden Soeharto gagal dan Gus Dur tetap terpilih menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU untuk ketiga kalinya.²⁸

²⁷ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 12-13

²⁸ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 13-15

Semasa hidupnya, Gus Dur juga melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1998. Partai politik warga NU ini dideklarasikan oleh lima orang kyai “Sepuh” NU yang bertindak sebagai deklarat, yaitu KH Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. Muchid Muzadi, KH. Munasir Ali dan KH. Abdurrahman Wahid.²⁹

Kehadiran PKB dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik nasional yang demokratis, bersih, terbuka, dan berakhlakul karimah seperti yang tertuang dalam naskah deklarasi partai:

*“maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Ja’nyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangsaan Bangsa.”*³⁰

PKB menegaskan jati dirinya sebagai partai terbuka yang secara konsisten memperjuangkan pluralisme, HAM, dan kesetaraan gender yang oleh politisi PKB dipandang sebagai tafsir atas doktrin *tawasuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi).³¹

Tidak berhenti sampai di situ, Gus Dur juga pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia. Gus Dur ialah ulama dan tokoh NU pertama yang menjadi Presiden Indonesia sejak kemerdekaan. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001. Ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah intruksi

²⁹ *Ibid.*, hal 19

³⁰ *Ibid.*, hal 19-20

³¹ *Ibid*

sebagai Presiden dicabut oleh MPR. Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang merupakan koalisi partai-partai yang terdiri dari berbagai partai politik seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), semasa menjabat sebagai Presiden. Kalangan profesional dan TNI juga masuk dalam kabinet tersebut.³²

Gus Dur melakukan beberapa langkah besar baik di pemerintahan maupun dalam kehidupan berbangsa, meskipun menjadi Presiden hanya dalam waktu yang singkat. Gus Dur berani melakukan reformasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang saat itu dinilai sangat korup. Ia juga menaikkan gaji pegawai negeri, khususnya gaji guru sebesar seratus persen. Bahkan Gus Dur menyetujui penyebutan nama Papua sebagai pengganti nama provinsi Irian Jaya dalam kunjungannya ke Irian Jaya pada tanggal 30 Desember. Gus Dur memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora asalkan posisinya lebih rendah dari bendera Merah Putih. Ia juga berencana memberi masyarakat Aceh kebebasan untuk melakukan kemerdekaan sebagaimana Timor Timur di masa B.J Habibie, tetapi lebih sebagai upaya agar rakyat Aceh dapat menentukan sendiri wilayahnya sebagai daerah otonom. Pada bulan Maret 2000 Gus Dur juga melakukan negoisasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman pemerintah RI dengan GAM. Langkah yang paling luar biasa dari Gus Dur semasa menjabat Presiden adalah mengeluarkan keputusan yang mencabut

³² Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 22

pemberlakuan Inpres No. 12 Tahun 1967 yang melarang budaya, adat istiadat, dan bahasa Cina di Indonesia. Bahkan Gus Dur menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur fakultatif. Pencabutan itu membuat warga Tionghoa bersukacita. Tarian Liong dan Barongsai mulai dipertontonkan secara terbuka dimana-mana. Selain itu, Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang ajaran Marxisme-Leninisme dicabut.³³

Akar pemikiran politik KH Abdurrahman Wahid didasarkan pada komitmen kemanusiaan (humanisme-insaniyah) dalam ajaran Islam. Intinya komitmen kemanusiaan itu adalah menghargai sikap toleransi dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap keharmonisan sosial (*social harmony*). Modus politik yang diperjuangkan oleh Gus Dur adalah komitmen terhadap sebuah tatanan politik nasional yang tidak sektarian dan sekaligus mengangkat universalitas kemanusiaan. *Platform* kehidupan umat Islam seharusnya diletakkan pada tiga prinsip persaudaraan yaitu *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathoniyah*, dan *ukhuwah basyariah*, sebagaimana prinsip NU.³⁴

Meskipun negara Pancasila tidak secara tegas sebagai negara agama dalam pandangan Islam, bukan berarti tidak membolehkan umat Islam menjalankan syariat agamanya. Ideologi Pancasila tidak berada pada kedudukan lebih tinggi dari Islam atau agama lain, sebab ia menjamin hak setiap pemeluk agama untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-

³³ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal 23

³⁴ *Ibid.*, hal 87-88

masing. Menurut Gus Dur, agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa bersumber antara Islam dan Pancasila. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Hubungan antara keduanya dapat digambarkan peranan agama dalam memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai luhur yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam pandangan hidup bangsa.³⁵

Sampai akhir hayatnya, Gus Dur sangat konsisten terhadap ketidaksetujuannya pada formalisme Islam sebagai model gerakan Islam untuk melahirkan negara dan sistem pemerintahan Islam, terutama di negara Indonesia yang sangat heterogen. Dalam konsep pembentukan negara, Gus Dur setuju dengan konsep Ibnu Khaldun:

*“Agama saja tidak cukup untuk dapat membentuk suatu negara. Pembentukan negara, di samping paham keagamaan juga diperlukan rasa “ashabiyah” (perasaan keterikatan). Tujuannya, membentuk ikatan sosial kemasyarakatan.”*³⁶

Gus Dur setuju dengan paham kebangsaan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa alasan berdirinya sebuah negara karena adanya perasaan kebangsaan itu. Menurut Gus Dur, tidak ada alasan lain bagi umat Islam selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama sebagaimana mempertahankan negara damai (*Darul Sulh*).³⁷

³⁵ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 90

³⁶ *Ibid.*, hlm 94-95

³⁷ Ali Maksyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 95

Dari penelusuran melalui sejarah dan literatur, dapat dilihat apabila pemikiran Gus Dur yang juga pemikiran NU dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia saling berlawanan. Kelompok HT berpendapat bahwa negara Islam sebaiknya dipimpin oleh sistem kekhilafahan Islam. Berbeda dengan NU, organisasi masyarakat yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Seperti berita yang sering beredar, kelompok HTI dibubarkan karena didasari oleh ideologi kekhilafahan yang mengancam kedaulatan politik negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2) “Memahami Isi dan Kemasan, Bagaimana Kita Harus Bersikap?”

Analisis wacana Van Dijk memberi perhatian yang besar pada akses, bagaimana akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Penulis yang bernama Yunizar Ramadhani merupakan anggota Forum Keberagaman Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah sekaligus pengurus cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. GP Ansor adalah sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang berfasiliasi dengan NU. Sedangkan FKUB salah satunya berperan meningkatkan pemahaman tentang kerukunan beragama melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memperdalam pemahaman tentang kemajemukan, keragaman, dan kerukunan hidup beragama. Dikarenakan penulis merupakan bagian dari organisasi tersebut dan memiliki ideologi yang sejalan dengan kelompok NU, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada

media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak.

Penulis mempersuasi khalayak melalui pengetahuannya mengenai cara bersikap dalam memandang substansi dan bentuk. Ia menyayangkan kesulitan membedakan antara substansi dan bentuk, antara isi dan kemasan, antara makna dan simbol, serta sejenisnya, lambat-laun akan melahirkan cara berpikir fundamentalis dan secara bertahap memuluskan jalan pikiran radikal dan terorisme. Di sini peneliti dapat mengaitkan organisasi FKUB dan NU sama-sama menolak pemikiran fundametalis dan gerakan Islam radikal. Seperti yang ditulis oleh Fazlur Rahman dalam buku *Islam dan Modernitas*, kaum fundamentalis sangat terbiasa dengan kata-kata menjalankan Islam secara *kaffah* dan untuk itu keadaan masyarakat selalu harus dikembalikan seperti zaman Nabi dan para sahabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa fundamentalisme muncul sering kali disebabkan sikap oposisi dan kecemburuan sosial, dan tidak membangun suatu kerangka intelektual yang canggih seperti yang dilakukan oleh kaum modernis atau neo-modernis. Oleh karenanya, fundamentalisme akan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat yang sulit untuk berkembang akibat adanya penguasa yang tidak begitu peduli pada keadaan sosial, dan di tengah masyarakat yang tidak berkembang cara berpikir ilmiah dan cara hidup rasional.

3) “Tiga Perguruan Tinggi AS Belajar ke PBNU”

Dalam berita yang dimuat pada tanggal 04 Juni 2014, jelas terlihat bahwa kelompok NU menerima ideologi pluralisme agama. Hal ini terbukti ketika mahasiswa luar negeri yang berasal dari Amerika Serikat dan dalam negeri, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga melakukan kunjungan guna mempelajari pluralisme agama dan masyarakat demokrasi.

Peneliti mencoba menelusuri paham keagamaan kelompok NU dengan mengakses dalam *website* NU. Di situ tertulis bahwa NU menganut paham Ahlulsunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir seperti itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari'at. Gagasan kembali ke Khittah pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlulsunah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Dan merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Sebagai kelompok atau pihak yang mengusung ideologi pluralisme agama, NU berwenang untuk menyanggupi delegasi kunjungan tersebut untuk mempelajari pluralisme agama dan masyarakat demokrasi. Dengan demikian, *media online* yang dimiliki kelompok NU memiliki akses yang lebih besar untuk mempengaruhi wacana pluralisme agama kepada publik. Berita tersebut memperlihatkan eksistensi kelompok NU sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk memberikan materi mengenai pluralisme agama dan masyarakat demokrasi. Tak lain karena NU berusaha melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.

D. Perbandingan Pemberitaan Pluralisme Agama dalam *Media Online* HTI dan NU

Jika kita kembali melihat visi dan misi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dan Nadhlatul Ulama, tentunya kita akan memperoleh perbedaan yang cukup bertolak belakang keduanya. Perbedaan kedua yang cukup menonjol terletak pada ideologi keduanya. Kelompok HTI mengedepankan sistem kekhalfahan, sedangkan kelompok NU menganut *Ahlusunnah Wal Jamaah*. Dalam *website* NU tertera bahwa mereka menganut paham Ahlusunnah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah esktrim aqli (rasionalis) dengan kaum esktrim naqli (spritualis). Kelompok NU merupakan kelompok yang menerima dan menghargai perbedaan atau pluralisme.

Pada teks media yang diproduksi oleh redaksi HTI, pihak HTI sering mempersoalkan isu kebhinekaan, salah satunya kasus Ahok. Mereka sangat sering menunjukkan kebenciannya terhadap Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ahok merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang terkena kasus penistaan agama saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Dalam tulisannya, mereka juga tidak sependapat dengan paham demokrasi yang dianggap menjadi pintu masuknya pro imperialis dan fenomena kemunculan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Peneliti menyadari pemakaian kalimat tersebut untuk memperkuat legitimasi dan menyingkirkan lawan kelompok mereka sendiri. Berbeda dengan HTI, kelompok NU mengistimewakan Gus Dur sebagai tokoh plural yang membawa kedamaian. Bahkan dalam salah satu berita yang *diposting* oleh NU, mereka pernah menerima kunjungan enam perguruan tinggi yang berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia untuk belajar pluralisme ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Tidak sama dengan NU, kelompok HTI memilih untuk menolak paham-paham yang menurutnya menyimpang dan tidak sesuai ajaran Islam, termasuk pluralisme. Sehingga, redaksi HTI membingkai kumpulan tulisan yang bersangkutan dengan pluralisme agama cenderung negatif.

Penulis dapat melihat perbandingan pemberitaan pluralisme agama dalam *media online* yang diproduseri oleh kelompok HTI dan NU. Ditinjau dari tulisan yang ditampilkan dalam *websitenya*, kelompok HTI dikatakan

sebagai kelompok sempalan karena penyimpalan kelompok tersebut terdapat pada konsepsi politiknya yang berusaha mendirikan negara atau kekhalifahan Islam. Sebaliknya, *media online* yang dimiliki oleh kelompok NU menyikapi persoalan pluralisme agama dengan menerima sekaligus memercayai perbedaan.

E. Analisis Sistemik *Media Online* HTI dan NU

1. *Media Online* HTI

Berdasarkan analisis teks yang dilakukan oleh peneliti terhadap tulisan-tulisan yang terangkum dalam *website* HTI, tergambar bahwa HTI menolak paham pluralisme agama. Lalu, dalam wawancara yang dilakukan oleh media Republika, Juru Bicara (Jubir) HTI menganggap sistem khilafah tidak salah sehingga peneliti dapat menyimpulkan ideologi kelompok tersebut berpengaruh pada kognisi individu wartawan. Pada praktik kekuasaan dan akses yang mempengaruhi wacana, HTI mudah menyebarkan gagasan melalui *media online* karena konten Islam yang diproduksi. Sehingga pembaca yang sedang mendalami sisi keislaman dengan mudah tergiring oleh tulisan yang diproduksi. Tetapi, baru-baru ini pemerintah telah membubarkan kelompok tersebut karena teridentifikasi sebagai kelompok Islam sempalan. Pemerintah mengatakan bahwa kelompok HTI teridentifikasi telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, khalayak pembaca mulai sadar dan tidak lagi percaya dengan gagasan yang diproduksi oleh HTI.

2. *Media Online* NU

Beralaskan analisis teks yang dilakukan oleh peneliti terhadap tulisan yang terangkum dalam *website* NU, kelompok NU menerima paham pluralisme agama atau lebih tepatnya memilih garis tengah. Dalam tulisan-tulisan yang diproduksi, kelompok tersebut tergolong sensitif terhadap isu keberagaman. Hal ini dapat dilihat dari struktur sintaksis yang memberi arahan bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan ke mana tulisan tersebut akan dibawa. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tulisan yang dipublikasi pun sesuai dengan *framing* NU. Selanjutnya, dari praktik kekuasaan dan akses yang mempengaruhi wacana, kelompok NU juga mudah menyebarkan gagasan melalui *media online* karena konten Islam yang diproduksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dengan model wacana Teun A. Van Dijk dan dipadukan dengan wacana pemberitaan pluralisme agama, maka penulis menyimpulkan bahwa penggambaran pluralisme agama yang diberitakan oleh HTI cenderung literalis dan NU lebih condong pada garis tengah atau moderat. Kelompok Islam sempalan menganggap dirinya lebih baik dari lawannya dan mereka cenderung eksklusif. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari kelompok HTI. Sebaliknya, kelompok Islam mapan seperti NU melihat paham pluralisme agama sebagai kewajiban dan bukan untuk dihindari.

Berdasarkan analisis teks yang dilakukan oleh peneliti terhadap tulisan-tulisan yang terangkum dalam *website* HTI, tergambar bahwa HTI menolak paham pluralisme agama. Lalu, dalam wawancara yang dilakukan oleh media Republika, Juru Bicara (Jubir) HTI menganggap sistem khilafah tidak salah sehingga peneliti dapat menyimpulkan ideologi kelompok tersebut berpengaruh pada kognisi individu wartawan. Pada praktik kekuasaan dan akses yang mempengaruhi wacana, HTI mudah menyebarkan gagasan melalui *media online* karena konten Islam yang diproduksi. Sehingga pembaca yang sedang mendalami sisi keislaman dengan mudah tergiring oleh tulisan yang diproduksi. Tetapi, baru-baru ini

pemerintah telah membubarkan kelompok tersebut karena teridentifikasi sebagai kelompok Islam sempalan. Pemerintah mengatakan bahwa kelompok HTI teridentifikasi telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, khalayak pembaca mulai sadar dan tidak lagi percaya dengan gagasan yang diproduksi oleh HTI.

Sedangkan, beralaskan analisis teks yang dilakukan oleh peneliti terhadap tulisan yang terangkum dalam *website* NU, kelompok NU menerima paham pluralisme agama atau lebih tepatnya memilih garis tengah. Dalam tulisan-tulisan yang diproduksi, kelompok tersebut tergolong sensitif terhadap isu keberagaman. Hal ini dapat dilihat dari struktur sintaksis yang memberi arahan bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan ke mana tulisan tersebut akan dibawa. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tulisan yang dipublikasi pun sesuai dengan *framing* NU. Selanjutnya, dari praktik kekuasaan dan akses yang mempengaruhi wacana, kelompok NU juga mudah menyebarkan gagasan melalui *media online* karena konten Islam yang diproduksi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberitaan pluralisme agama dalam *media online* HTI dan NU, peneliti memiliki beberapa saran, antara lain:

1. Untuk Pembaca

Independensi media sudah tergoyahkan. Banyak media memiliki makna tersembunyi atau maksud tertentu untuk mengembangkan sebuah pemberitaan. Perusahaan media massa masih mengutamakan kepentingannya. Kebijakan redaksional pemilik media massa HTI dan NU yang berbeda, secara otomatis menghasilkan pula konstruksi tulisan yang berbeda atas kenyataan yang sama. Sebaiknya khalayak pembaca menjadi lebih bijak dan cerdas ketika membaca sebuah berita. Kita harus lebih teliti menyerap teks media dan menambah sumber bacaan agar dapat menemukan wacana media satu dan lainnya. Tak hanya itu, pembaca juga menciptakan diskusi, sehingga dengan intensitas kegiatan tersebut dapat memberikan pelajaran yang berarti dalam kehidupan sosial, khususnya interrelasi sosial dengan masyarakat yang berbeda keyakinan.

2. Untuk Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembahasan mengenai pluralisme agama masih menjadi momok yang sensitif. Melalui penelitian analisis teks wacana ini, diharapkan akan memberikan sumbangsih bagaimana menghadapi fenomena keberagaman agama. Dengan itu, kita dapat memelihara keharmonisan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, diharapkan lebih sensitif terhadap isu-isu keberagaman baik agama, kultur, gender, dan lain-lain. Dan apabila nantinya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam menjadi sebagai pelaku media, sebaiknya dapat memegang prinsip jurnalistik "*cover both side*" di mana berita harus proporsional tanpa menyudutkan kaum mayoritas dan minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- McQuail, Denis. 2012. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zubaidi, Advan Navis., “Ruang Publik Dalam Media Baru (www.kaskus.us).” Dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume 1, 2011
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Ismail, Nawari. 2014. *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan, dan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru-Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY.
- Saptono .dan Bambang Suteng. 2006. *Sosiologi SMA untuk kelas X*. Jakarta: PT. Phibeta Aneka Gama.
- Supiandi. 2014. “Pluralisme Agama dalam Film (Tinjauan Materi dan Metode dari Perspektif Pendidikan Agama Islam)”. Skripsi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2014
- Syamsudin, M. 2008. “Pengembangan Pluralisme Agama dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir Al-Azhar)”. Skripsi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2008
- Marindra, Inka Mayang. 2016. “Analisis Representasi Pluralisme Agama Dan Budaya Dalam Film ‘Cinta Tapi Beda’”. Skripsi pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung. 2016
- Pakpahan, Roy. 1998. *Penuntun Program Jurnalistik Terpadu Bagi Kalangan LSM*. Jakarta: Institut Ecata Indonesian NGOs Partnership Intitiative (INPI) Pact-Solidaritas Masyarakat Pers Indonesia (SMPI).
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Iriantara, Yosol. 2009. *Manajemen Media Massa*. Banten: Universitas Terbuka.
- Kusumaningrat, Hikmat .dan Purnama Kusumaningrat. 2009. *Jurnalistik-Teori & Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wahyuninto, Liza, dkk. 2010. *Memburu Akar Pluralisme Agama: mencari isyarat-isyarat pluralisme agama dalam al-qur'an dan berbagai perspektif*. Malang: UIN Malang Press.
- Thoha, Anis Malik. 2005. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif.

- Biyanto. 2009. *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan-Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*. Malang: UMM Press.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (perh.). 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ghazali, Abd Moqsith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: Pesona Khayangan Estate
- Nata, Abuddin. 2002. *Problematika Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia-UIN Jakarta Press.
- Jawahir, Thontowi. 2001. *Pesan Perdamaian Islam*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Yewangoe, A.A. 2009. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Beuken, Wim .and Karl-Josef Kuschel. 2003. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Abdullah, Zulkarnaini. 2007. *Yahudi dalam Al-Qur'an-Teks, Konteks, dan Diskursus Pluralisme Agama*. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Arifinsyah. 2016. *Dialog Quran dan Bibel: Menyingkap Pesan Suci Merajut Hubungan Antarumat Beragama*. Medan: CV Mahanji-Fak Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU.
- Harahap, Syahrin. 2015. *Islam dan Modernitas (dari teori modernisasi hingga pengakuan kesalehan modern)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mochtar, Kustiyan. 1988. *Semua Manusia Bersaudara (Kehidupan dan Gagasan Sebagaimana Diceritakannya Sendiri)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis, dkk. 2007. *Memahami Hubungan antar Agama*. Yogyakarta: Elsaq Press
- Burhanuddin, Nunu. 2015. "Gerakan Sempalan Ahmadiyah: Dari Fenomena Urban Keagamaan Reformis ke Messianis-Introversionis." Dalam *Jurnal Islam dan Studi Sosial*, Vol. 1, 2015
- Langaji, Abbas., "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama."
- Andhoni, Yudi. 2010. "Kesalehan nan Terlampaui: Desakralisasi Ritus Hoyak Hosen di Pariaman Sumatera Barat". Dalam *Jurnal al-Qurba*, Vol. 1, 2010
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif-Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana-Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Prenada Media Group.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana-pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.

Indasah, Kurnia. 2004. "Konsep Gender dalam Media Islam Online". Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2014

Bajuri, Muhammad .dan Romli Abu Wafa. 2012. *Tsaqodah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing.

Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU-Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta-Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Musa, Ali Maksyur. 2010. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.

